

Katalog: 9101009.16

ISSN 3031-3546

# Analisis Isu Terkini

Provinsi Sumatera Selatan

# 2023

Volume 5, 2024

Ketimpangan dan Kesenjangan Gender  
di Sumatera Selatan:  
Analisis dan Tren



Katalog: 9101009.16

ISSN 3031-3546

# Analisis Isu Terkini

Provinsi Sumatera Selatan

# 2023

Volume 5, 2024

Ketimpangan dan Kesenjangan Gender  
di Sumatera Selatan:  
Analisis dan Tren

# ANALISIS ISU TERKINI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023

Volume 5, 2024

Katalog : 9101009.16  
ISSN : 3031-3546  
Nomor Publikasi : 16000.24023

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : xiv+55 halaman

Penyusun Naskah:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pembuat Kover:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penerbit:  
©BPS Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Ilustrasi:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *freepik.com*

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

# Tim Penyusun

Analisis Isu Terkini  
Provinsi Sumatera Selatan  
2023

Volume 5, 2024

**Pengarah:**

Moh. Wahyu Yulianto, S.ST., S.Si., M.Si

**Penanggung Jawab:**

Marpaleni, M.A., Ph.D

**Penyunting:**

Marpaleni, M.A., Ph.D

Lia Nurliana, S.Si., M.Si

**Penulis Naskah dan Pengolah Data:**

Lia Nurliana, S.Si., M.Si

Desi Eryani, S.ST., M.Si

Financy Ramadhani, S.ST., M.E.K.K

**Penata Letak:**

Financy Ramadhani, S.ST., M.E.K.K





# Kata Pengantar

Dengan segala puji syukur, kami hadirkan publikasi ini sebagai bentuk kontribusi kami dalam upaya memahami dan mengatasi ketimpangan gender yang masih menjadi tantangan besar di berbagai aspek kehidupan. Publikasi ini mengangkat isu-isu terkini terkait ketimpangan gender yang terus berkembang dan berdampak signifikan terhadap pembangunan masyarakat.

Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, masih banyak bidang di mana ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok gender lainnya terjadi. Publikasi ini berusaha untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek ketimpangan gender, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik.

Melalui analisis mendalam dan data terbaru, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas ketimpangan gender dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap publikasi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat luas dalam upaya mereka memperjuangkan kesetaraan gender.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini, termasuk para peneliti, penulis, dan editor yang telah bekerja keras untuk menghadirkan informasi yang akurat dan relevan. Kami juga berterima kasih kepada pembaca yang telah menunjukkan minat dan komitmen dalam mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi langkah kecil namun berarti dalam perjalanan panjang menuju dunia yang lebih adil dan setara.

Palembang, Juli 2024

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan



Moh. Wahyu Yulianto





# Ringkasan Eksekutif

Publikasi Analisis Isu Terkini yang diterbitkan BPS Provinsi Sumatera Selatan edisi ini berfokus pada isu ketimpangan gender dan kesetaraan gender di Sumatera Selatan. Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kesetaraan gender di berbagai wilayah di provinsi ini, serta menyajikan data dan analisis yang relevan untuk pembuat kebijakan, akademisi, dan peneliti.

Ketimpangan gender masih menjadi isu yang signifikan di Sumatera Selatan, berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Publikasi ini mengevaluasi perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dalam kurun waktu 2019-2023. Analisis ini mencakup dimensi-dimensi penting seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar tenaga kerja, serta disparitas antarwilayah.

Pengukuran IDG dan IKG dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang relevan untuk menilai tingkat kesetaraan gender di Sumatera Selatan. Indikator-indikator ini mencakup proporsi perempuan dalam parlemen, tingkat partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, serta akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa IDG Sumatera Selatan mengalami peningkatan secara konsisten selama lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, IDG menunjukkan perbaikan yang signifikan, terutama dalam dimensi partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Peningkatan persentase perempuan yang menduduki posisi profesional dan manajerial mengindikasikan adanya kemajuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun, kesenjangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih cukup lebar.

IKG menunjukkan penurunan ketimpangan gender dalam akses kesehatan reproduksi dan pendidikan. Proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan menurun, mencerminkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu. Peningkatan representasi perempuan dalam badan legislatif dan penyempitan kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan. Namun, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih tertinggal dibandingkan laki-laki, menunjukkan adanya hambatan struktural yang perlu diatasi.

Terdapat disparitas yang signifikan antarwilayah dalam pencapaian kesetaraan gender. Beberapa wilayah menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pali cenderung memiliki IDG terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Lahat menunjukkan capaian IDG tertinggi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender antara lain norma budaya lokal, kebijakan pemerintah daerah, akses pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ekonomi. Budaya patriarki masih kuat di beberapa wilayah, menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender bervariasi antarwilayah. Beberapa daerah telah menerapkan kebijakan yang lebih inklusif, sementara yang lain masih tertinggal. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai sangat mempengaruhi pencapaian kesetaraan gender. Wilayah dengan akses yang lebih baik menunjukkan pencapaian IDG yang lebih tinggi. Kondisi ekonomi juga memainkan peran penting dalam ketimpangan gender. Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki IDG yang lebih rendah.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan dalam publikasi ini antara lain peningkatan akses kesehatan reproduksi, peningkatan pendidikan dan pelatihan, mendorong partisipasi politik perempuan, kesetaraan di pasar tenaga kerja, dan pengembangan kebijakan lokal. Memperluas jangkauan layanan kesehatan ibu dan anak serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan dapat mengurangi risiko kesehatan. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi sangatlah penting. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan dalam badan legislatif dan pemerintahan, serta menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan akan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan upah dan kesempatan kerja, serta menghapus diskriminasi gender di tempat kerja juga sangat penting. Selain itu, mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan yang sensitif gender dan menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengurangi ketimpangan gender juga perlu dilakukan.

Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Sumatera Selatan dapat mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam upaya mengatasi ketimpangan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Implementasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan akan membantu mempercepat perubahan positif dan memastikan bahwa kesetaraan gender tercapai di seluruh wilayah Sumatera Selatan.



# Daftar Isi

Analisis Isu Terkini

Provinsi Sumatera Selatan 2023

Volume 5, 2024

Tim Penyusun .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
<b>Bab I Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Gender Antarwilayah di Sumatera Selatan (2019-2023).....</b>	<b>1</b>
IDG dan Relevansinya dalam Mengukur Pemberdayaan Gender .....	3
Metodologi Pengukuran IDG .....	5
Perkembangan Pemberdayaan Gender di Sumatera Selatan .....	10
Dimensi Pembentuk IDG .....	12
a. Dimensi Partisipasi Politik .....	14
b. Dimensi Pengambilan Keputusan .....	16
c. Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi .....	17
Disparitas Antarwilayah .....	19
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan IDG Antarwilayah .....	23
a. Norma Budaya Lokal .....	26
b. Kebijakan Pemerintah Daerah .....	27
c. Akses Pendidikan .....	27
d. Akses Kesehatan .....	29
e. Kondisi Ekonomi .....	29
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan .....	30
Daftar Pustaka .....	33
<b>Bab II Analisis Ketimpangan Gender di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan: Indikator, Tren, dan Disparitas Antarwilayah .....</b>	<b>35</b>
Kesetaraan Gender: Mengapa Penting dan Bagaimana Cara Mengukurnya? .....	37
Dimensi dan Indikator IKG.....	40
a. Dimensi Kesehatan Reproduksi .....	40
b. Dimensi Pemberdayaan .....	41
c. Dimensi Partisipasi Pasar Tenaga Kerja .....	41
Ketimpangan Gender di Sumatera Selatan .....	42
a. Tren Ketimpangan Gender .....	42
b. Analisis Komponen IKG .....	45
Ketimpangan Gender Antarwilayah di Sumatera Selatan .....	50
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan .....	52
Daftar Pustaka .....	54



# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perkembangan Komponen Penyusun IDG Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022-2023 .....	20
Tabel 1.2	Evolusi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	22
Tabel 1.3	Evolusi <i>Gap</i> Antara Laki-laki dan Perempuan pada Dimensi Partisipasi Politik Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan .....	23
Tabel 1.4	Evolusi <i>Gap</i> Antara Laki-laki dan Perempuan pada Dimensi Pengambilan Keputusan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan .....	24
Tabel 1.5	Evolusi <i>Gap</i> Antara Laki-laki dan Perempuan pada Dimensi Pengambilan Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan .....	26
Tabel 2.1	Perkembangan Indikator-indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018-2023 .....	44





# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG .....	6
Gambar 1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Selatan, 2019-2023 .....	11
Gambar 1.3	Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Selatan, 2019-2023.....	14
Gambar 1.4	Perkembangan Selisih Dimensi Partisipasi Politik Sumatera Selatan, 2019-2023 .....	15
Gambar 1.5	Perkembangan Selisih Dimensi Pengambilan Keputusan Sumatera Selatan, 2019-2023 .....	16
Gambar 1.6	Persentase Sumbangan Pendapatan Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023.....	17
Gambar 1.7	Perkembangan Selisih Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Sumatera Selatan, 2019-2023 .....	18
Gambar 1.8	Capaian IDG Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2023 .....	19
Gambar 1.9	Persentase Penduduk Usia 25 Tahun keatas dengan Pendidikan SMA ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/kota, Tahun 2023 .....	28
Gambar 1.10	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2023 .....	30
Gambar 2.1	Bagan Dimensi dan indikator IKG .....	42
Gambar 2.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018-2023 .....	43
Gambar 2.3	Perkembangan Indikator Kesehatan Reproduksi di Sumatera Selatan, 2018-2023 .....	46
Gambar 2.4	Persentase Anggota Legislatif Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2018-2023 .....	47
Gambar 2.5	Persentase Penduduk 25 Tahun Ke Atas yang Berpendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan, 2018-2023 .....	48
Gambar 2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan, 2018-2023 .....	49
Gambar 2.7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022-2023 .....	51





# Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Gender Antarwilayah di Sumatera Selatan (2019-2023)

Lia Nurliana, S.Si, M.Si





# Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Gender Antarwilayah di Sumatera Selatan (2019–2023)

## **IDG dan Relevansinya dalam Mengukur Pemberdayaan Gender**

Kesetaraan gender adalah salah satu fondasi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata. Dalam konteks global, kesetaraan gender tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental, tetapi juga sebagai faktor krusial untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan gender bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak yang diperlukan untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat (Nugroho, 2008).

Kesetaraan gender membawa berbagai manfaat signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, kita dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat perekonomian, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, kesetaraan gender juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara umum (Widiastuty, 2019). Oleh karena itu, mencapai kesetaraan gender adalah tujuan penting yang harus terus diperjuangkan melalui kebijakan yang mendukung, edukasi yang inklusif, dan perubahan budaya yang progresif.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat ukur yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik serta memiliki akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (KPPA & BPS, 2016). IDG mengukur tiga dimensi utama: partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, IDG memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.



Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama saat berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan (Nugroho, 2008). Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan serta perilaku yang dikonstruksikan secara sosial (Wood, 2005).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan meningkatkan pelibatan perempuan dalam proses pembangunan, sejak menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, memantau jalannya pembangunan sampai mendapatkan manfaat dari program pembangunan tersebut (Tupamahu, 2020).

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada empat indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level (UNDP, 1995). Selanjutnya, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan adopsi dari *Gender Inequality Index* (GII) yang menunjukkan capaian





pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja (UNDP, 2016).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peranan gender pada bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan (Alfiana, 2015). Kesetaraan dan keadilan gender diartikan sebagai kondisi dimana siklus dan porsi laki-laki dan perempuan yang serasi, setara, seimbang dan harmonis. Makna yang dimaksud dalam kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih pada persoalan pencapaian peran, peran yang dimaksud ialah perempuan memiliki peranan yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintah, pengambilan keputusan di bidang politik dan aktivitas ekonomi khususnya peran perempuan dalam pendapatan rumah tangga (Dini, *et al.*, 2020).

Relevansi IDG dalam mengukur pemberdayaan gender sangat penting karena memberikan data yang konkret dan dapat diukur tentang sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai di berbagai wilayah. Di Sumatera Selatan, analisis data IDG dari tahun 2019 hingga 2023 membantu dalam memahami perkembangan dan perubahan dalam pemberdayaan gender di provinsi ini. IDG memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi lebih lanjut, merancang strategi yang efektif, dan memonitor kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mencapai kesetaraan gender (Yuslin, 2021).

Dengan memahami dan mengukur pemberdayaan gender melalui IDG, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Data yang dihasilkan dari IDG juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memastikan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender terus berlanjut dan diperkuat (UNDP, 1995).

### **Metodologi Pengukuran IDG**

Ukuran pemberdayaan gender (IDG), diperkenalkan pertama kali oleh UNDP di *Human Development Report* (HDR) pada tahun 1995, berkonsentrasi pada partisipasi, mengukur ketidaksetaraan gender di bidang utama partisipasi ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. IDG menggunakan variabel yang dibangun secara eksplisit untuk mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

yang berfokus pada perluasan kapabilitas perempuan dan laki-laki, IDG berkaitan dengan penggunaan kemampuan tersebut untuk berpartisipasi dalam kehidupan nyata.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Peran aktif perempuan ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran signifikan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG disusun menggunakan tiga dimensi utama, yaitu partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan penguasaan sumber daya ekonomi.



Sumber: WHO (2024)

Gambar 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG

Pertama, **partisipasi politik** mengukur keterlibatan perempuan dalam badan legislatif dan peran mereka dalam pembuatan kebijakan publik. Indikator ini mencakup persentase kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, yang dapat mencerminkan kesetaraan gender yang lebih baik dalam ranah politik (Dini *et al.*, 2020).

Kedua, **pengambilan keputusan** mengukur keterlibatan perempuan dalam posisi manajerial dan profesional di berbagai sektor. Indikator ini mencakup persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial, administrasi, dan teknis. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tempat kerja menunjukkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik organisasi, yang penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam lingkungan kerja (Wisnujati, 2020).



Ketiga, **penguasaan sumber daya ekonomi** mengukur kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga dan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Indikator ini mencakup persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga dan partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja. Penguasaan sumber daya ekonomi oleh perempuan menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi mereka dan kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang penting bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka (Karyono, Y., *et al.*, 2019).

Dengan menggunakan ketiga dimensi ini, IDG memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Data yang dihasilkan oleh IDG membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Selain itu, IDG memungkinkan evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memastikan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender terus berlanjut dan diperkuat (UNDP, 1995).

### **Penghitungan Indikator IDG**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur menggunakan beberapa indikator komponen yang diatur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator pertama adalah persentase anggota DPRD menurut jenis kelamin, yaitu persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan dan laki-laki di DPR-RI dan DPRD. Indikator ini penting karena mencerminkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, yang merupakan aspek krusial dari pemberdayaan gender.

Indikator kedua adalah persentase tenaga profesional menurut jenis kelamin, yang mencakup persentase tenaga kerja perempuan dan laki-laki dengan klasifikasi sebagai tenaga profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha. Keterlibatan perempuan dalam posisi profesional ini menunjukkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam bidang-bidang yang membutuhkan keahlian dan keahlian khusus, serta kemampuan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan di tempat kerja.

Indikator ketiga adalah sumbangan pendapatan menurut jenis kelamin, yaitu share pendapatan perempuan dan laki-laki terhadap total pendapatan. Dalam hal ini, pendapatan diproksi dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini mengukur kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga dan pasar tenaga kerja, yang merupakan aspek penting dari kemandirian ekonomi dan pemberdayaan gender.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP (*Equally Distributed Equivalent Percentage*) untuk tiap komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. EDEP mencerminkan distribusi ideal kontribusi gender yang merata dalam setiap komponen. Selanjutnya, masing-masing indeks komponen dihitung dengan membagi nilai EDEP dengan 50, yang dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

Penghitungan Indeks Keterwakilan Parlemen ( $I_{par}$ ), menggunakan rumus:

$$EDEP_{par} = \left[ \frac{X_p}{Y_p} + \frac{X_l}{Y_l} \right]^{-1}$$
$$I_{par} = EDEP_{par} / 50$$

Keterangan:

$X_p$ : proporsi penduduk perempuan

$X_l$ : proporsi penduduk laki-laki

$Y_p$ : proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

$Y_l$ : proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

Indeks Pengambilan Keputusan ( $I_{dm}$ ) dihitung dengan rumus:

$$EDEP_{dm} = \left[ \frac{X_p}{Y_p} + \frac{X_l}{Y_l} \right]^{-1}$$
$$I_{dm} = EDEP_{dm} / 50$$

Keterangan:

$X_p$ : proporsi penduduk perempuan

$X_l$ : proporsi penduduk laki-laki

$Y_p$ : proporsi tenaga profesional perempuan

$Y_l$ : proporsi tenaga profesional laki-laki

Tenaga profesional dihitung dari persentase perempuan yang bekerja dengan kode KBJI 2000 0, 1, 2, dan 3 dari data Sakernas. Kode-kode ini mencakup:

Kode 0: Anggota TNI dan POLRI

Kode 1: Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer

Kode 2: Tenaga Profesional

Kode 3: Teknisi dan Asisten Tenaga Profesional





Dengan mengaplikasikan formula ini, IDG memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi. Indikator-indikator ini membantu pembuat kebijakan memahami area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan memungkinkan mereka merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemberdayaan gender.

Selanjutnya adalah indeks distribusi pendapatan ( $I_{inc-dis}$ ). Penghitungan indeks ini menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode lama. Pendekatan ini mempertimbangkan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran per kapita untuk menghasilkan perhitungan yang akurat dan dapat diandalkan. Batas maksimum dan minimum pengeluaran per kapita yang digunakan pada metode lama telah ditetapkan sebagai acuan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam analisis data ekonomi.

Sebelum menghitung indeks distribusi pendapatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari laki-laki dan perempuan. Ini dilakukan dengan mengukur rasio upah masing-masing gender terhadap total upah dan jumlah angkatan kerja. Rasio upah perempuan dihitung dengan membandingkan rata-rata upah perempuan terhadap rata-rata upah laki-laki, sementara rasio upah laki-laki dihitung dengan membandingkan rata-rata upah laki-laki terhadap dirinya sendiri untuk mendapatkan proporsi yang tepat.

Langkah berikutnya adalah menggabungkan rasio upah dengan jumlah angkatan kerja dari masing-masing gender untuk mendapatkan kontribusi pendapatan yang lebih representatif. Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan berapa proporsi sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki terhadap total pendapatan keluarga. Formula yang digunakan mencakup beberapa tahapan, termasuk menghitung rata-rata upah total, proporsi pendapatan terhadap rata-rata upah, dan akhirnya, sumbangan pendapatan masing-masing gender.

Setelah menghitung sumbangan pendapatan, data tersebut digunakan untuk menentukan indeks distribusi pendapatan. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kesetaraan gender dalam hal pendapatan ekonomi, yang menjadi bagian penting dalam analisis IDG. Perhitungan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran ekonomi perempuan dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Proses ini memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga relevan dalam mengukur tingkat pemberdayaan gender. Dengan memahami distribusi

pendapatan secara mendalam, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi. Hal ini penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam perekonomian.

Berikut adalah rumus penghitungannya:

$$\text{Rasio Upah P} = \frac{\text{Rata-rata upah perempuan}}{\text{Rata-rata upah laki-laki}}$$

$$\text{Rasio Upah L} = \frac{\text{Rata-rata upah laki-laki}}{\text{Rata-rata upah laki-laki}}$$

$$\text{rata2 upah} = ((\text{Rasio Upah P} \times \text{angkatan kerja (P)}) + (\text{Rasio Upah L} \times \text{angkatan kerja (L)}))$$

$$\text{rasio thd rata2 upah (P)} = \frac{\text{Rasio Upah P}}{\text{rata-rata upah}}$$

$$\text{sumbangan pendapatan (P)} = \text{rasio thd rata2 (P)} \times \text{angkatan kerja (P)} \times 100$$

$$\text{sumbangan pendapatan (L)} = 100 - \text{sumbangan pendapatan (P)}$$

$$\text{prop (P)} = \frac{\text{sumbangan pendapatan (P)}}{\text{proporsi penduduk (P)}}$$

$$\text{prop (L)} = \frac{\text{sumbangan pendapatan (L)}}{\text{proporsi penduduk (L)}}$$

$$X_{EDE} = \left[ \frac{\text{proporsi pend (L)}}{\text{prop (L)}} + \frac{\text{proporsi pend (P)}}{\text{prop (P)}} \right]^{-1}$$

$$I_{inc-dis} = \frac{X_{EDE} \times \text{pengeluaran per kapita metode lama} - 360}{732,72 - 300}$$

Sehingga Indeks Pemberdayaan Gender:

$$IDG = \frac{1}{3} (I_{par} + I_{dm} + I_{inc-dis}) \times 100$$

## Perkembangan Pemberdayaan Gender di Sumatera Selatan

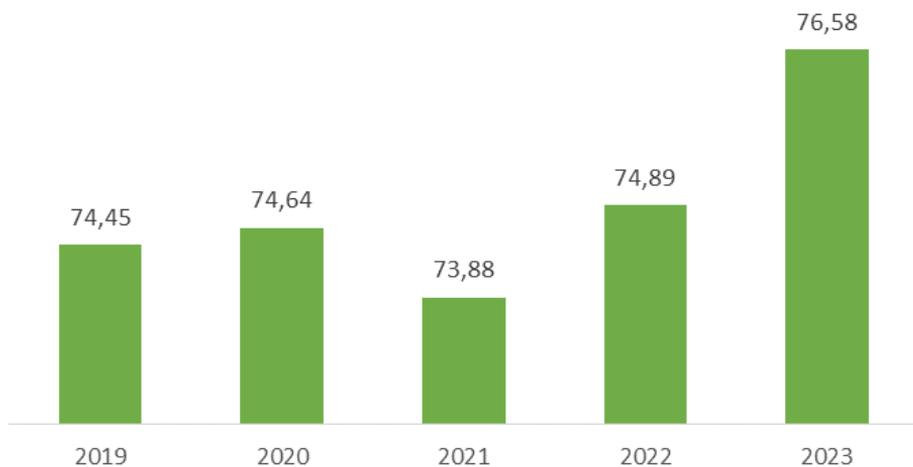
Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari meningkatnya nilai IDG dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di Sumatera Selatan menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak



hanya mampu berdampak di provinsi saja, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antar wilayah di Sumatera Selatan. Kualitas sumber daya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2023 mencapai 76,58.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir meningkat secara konsisten, meskipun sempat menurun di tahun 2021. Sejak tahun 2019 hingga 2023, IDG bertambah sebesar 2,13 poin atau rata-rata naik 0,53 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan pemberdayaan gender yang semakin meningkat atau pemberdayaan yang semakin membaik.

Penurunan nilai IDG di tahun 2021 adalah sebuah fenomena yang perlu dicermati. Jika diperhatikan lebih mendalam, penurunan pemberdayaan gender tersebut terjadi dalam periode pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia hingga kuartal kedua tahun 2023, termasuk Sumatera Selatan tidak hanya membawa malapetaka bagi sektor kesehatan namun juga mengakibatkan krisis kemanusiaan serta mengguncang ekonomi di seluruh dunia. Pada awal tahun 2021, Kementerian Tenaga Kerja RI mengungkapkan bahwa tenaga kerja perempuan yang terdampak pandemi COVID-19 mencapai lebih 623 ribu orang. Meskipun angka tersebut tidak sebesar jumlah pekerja laki-laki yang terdampak pandemi, namun beban yang diderita kaum perempuan pada masa pandemi lebih berat ketimbang kaum lelaki (Yayasan Jurnal Perempuan, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id)

**Gambar 1.2** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Selatan, 2019-2023



Selain itu, terdapat temuan bahwa kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Hal ini terungkap dari laporan survei *UN Women* yang berjudul “*Measuring the shadow pandemic: Violence against womwn during COVID-19*”. Laporan tersebut mengungkap bahwa 2 dari 5 perempuan yang mengikuti survei mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi kesehatan mental mereka (UN Women, 2021). Hasil survei mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat sehingga mengakibatkan kaum perempuan merasa rumah tidak lagi aman bagi mereka.

Stres akibat kondisi sosial-ekonomi dan pandemi yang tidak menentu, ditambah dengan konflik keluarga dapat berdampak signifikan, tidak hanya terhadap pengalaman kekerasan atau perasaan aman tetapi juga terhadap kesejahteraan perempuan secara keseluruhan. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung berpotensi memunculkan permasalahan yang mengganggu upaya peningkatan kesetaraan akses dan peran aktif yang adil dan inklusif bagi semua individu tanpa diskriminasi. Sehingga, pandemi memiliki andil besar terhadap penurunan nilai IDG.

Setelah pandemi COVID-19 pulih di tahun 2022 dan 2023, angka IDG pun terus mengalami peningkatan. Peningkatan IDG pada tahun 2022 disebabkan karena semakin mengecilnya *gap* antara laki-laki dan perempuan pada dimensi pengambilan keputusan. Artinya, pada tahun 2022 semakin banyak tenaga kerja perempuan yang mulai bekerja kembali dan menduduki posisi tenaga kerja profesional. Kondisi tersebut meningkatkan pemberdayaan gender yang pada akhirnya akan meningkatkan angka IDG. Sedangkan peningkatan IDG pada tahun 2023 lebih disebabkan karena meningkatnya partisipasi politik perempuan yang terlihat dari jumlah anggota dewan perempuan yang duduk di parlemen meningkat.

### **Dimensi Pembentuk IDG**

Indikator IDG digunakan untuk menggambarkan kesetaraan peranan atau pencapaian kapabilitas antara perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Ketika terjadi ketimpangan atau ada satu kelompok yang pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada yang lain (baik perempuan maupun laki-laki), maka nilai IDG akan jauh dari 100. Kenaikan indikator IDG menggambarkan peningkatan peran perempuan tanpa mengurangi peran laki-laki. Peningkatan ketimpangan pemberdayaan gender ditunjukkan oleh penurunan nilai IDG yang terdiri dari tiga indeks, yaitu indeks EDEP (*equally distributed equivalent percentage*) parlemen, indeks kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional, dan indeks EDEP





pendapatan. Indeks yang ideal adalah yang mendekati 100, yang menunjukkan kesetaraan gender dengan partisipasi perempuan dan laki-laki yang seimbang. Ketika peran salah satu kelompok melebihi 50%, maka terjadi ketimpangan gender. Semua perhitungan indeks komponen IDG menyertakan data proporsi jumlah perempuan. Ketika terjadi perubahan komposisi, angka indeks komponen akan berubah meskipun indikator komponennya tetap. Untuk mengkaji determinan utama perubahan nilai IDG di Sumatera Selatan, pembahasan akan berfokus pada tren atau perkembangan indikator atau dimensi pembentuk IDG, yaitu partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan penguasaan sumber daya ekonomi.

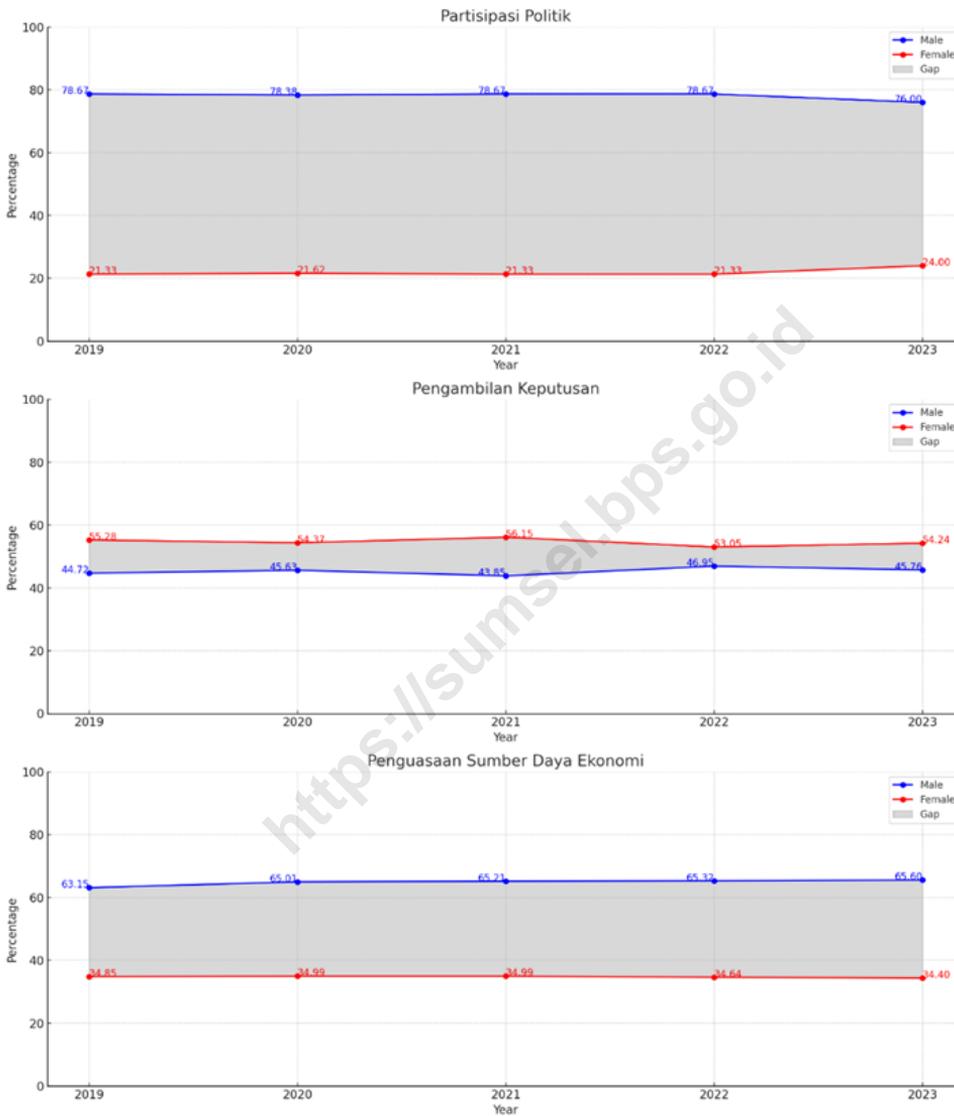
Secara keseluruhan, ketiga dimensi pembentuk IDG Sumatera Selatan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari perkembangan masing-masing indikator yang sebagian besar menunjukkan tren perubahan positif disertai dengan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang semakin kecil.

Dimensi pertama, yaitu partisipasi politik, menunjukkan tren perubahan yang positif. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di parlemen semakin kecil dengan meningkatnya persentase perempuan yang duduk di parlemen, yang secara bersamaan mengurangi persentase laki-laki.

Dimensi kedua yaitu pengambilan keputusan menunjukkan tren kesenjangan (*gap*) antara perempuan dan laki-laki yang berfluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi kesenjangan (*gap*) yang cukup besar dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19, kemudian *gap* tersebut menyempit di tahun 2022 dan melebar kembali di tahun 2023 meskipun tidak sebesar ketika tahun 2021. Meskipun perempuan yang menduduki tenaga profesional telah mencapai 50 persen lebih, tetapi *gap* pencapaian antara laki-laki dan perempuan pada dimensi ini memengaruhi angka IDG yang diperoleh Sumatera Selatan.

Dimensi ketiga yaitu penguasaan sumber daya ekonomi menunjukkan tren kesenjangan (*gap*) yang semakin lebar. Hal ini dikarenakan capaian upah/pendapatan yang diperoleh perempuan semakin menjauh dibandingkan dengan capaian upah/pendapatan yang diperoleh laki-laki. Dari kesenjangan (*gap*) per dimensi yang ada, kesenjangan (*gap*) pada dimensi pengambilan keputusan adalah yang paling kecil dibandingkan dengan *gap* pada dua dimensi lainnya. Artinya, kondisi perempuan di Sumatera Selatan yang menduduki tenaga profesional telah menandakan adanya pemberdayaan gender. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi perempuan Sumatera Selatan untuk bisa menunjukkan kapabilitas atau persamaan perannya dengan laki-laki

pada aspek pengambilan keputusan. Untuk penjelasan lebih lengkap terkait perkembangan dimensi IDG dijelaskan pada subbab selanjutnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id) (diolah)

Gambar 1.3 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Selatan, 2019-2023

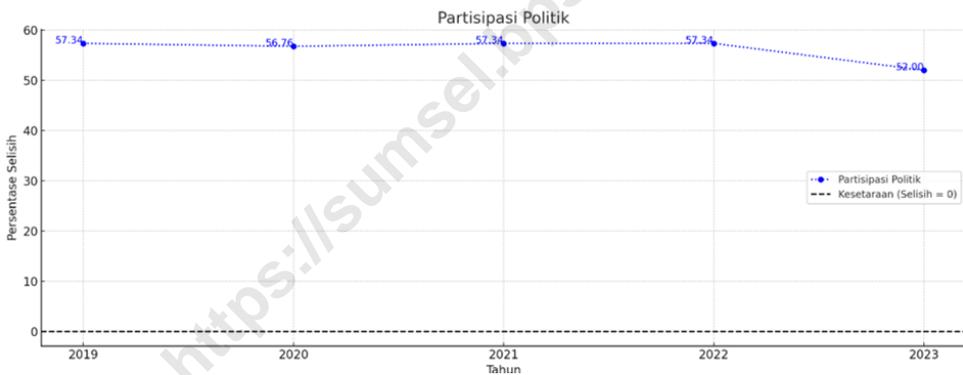
### a. Dimensi Partisipasi Politik

Pemberdayaan gender dapat tercapai dengan rasio sempurna, ketika keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor setara dengan laki-laki. Salah satu sektor penting adalah politik. Diharapkan dengan tercapainya kesetaraan dalam sektor



politik, kebijakan yang bias gender dapat diminimalisasi. Namun, realitasnya sektor politik di Sumatera Selatan masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data, rata-rata keterlibatan perempuan dari tahun 2019 hingga 2023 hanya berkisar 24 persen (lihat gambar 1.3), masih di bawah kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen.

Meskipun kesenjangan dalam dimensi partisipasi politik masih besar, tren penurunannya mulai terlihat. Sebagai contoh, gambar 1.4 menunjukkan penurunan persentase selisih partisipasi politik dari 57,34% pada tahun 2019 menjadi 52,00% pada tahun 2023. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menurunkan kesenjangan tersebut dengan meningkatkan persentase perempuan di parlemen sehingga mendekati kondisi yang setara.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id) (diolah)

**Gambar 1.4** Perkembangan Selisih Dimensi Partisipasi Politik Sumatera Selatan, 2019-2023

Selama periode tahun 2019 hingga 2023, persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif cenderung stagnan, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang cenderung semakin setara. Fenomena peningkatan ini dapat diakibatkan oleh banyak hal, terutama dinamika politik di Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui, persentase anggota legislatif sangat tergantung terhadap pemilihan umum yang berlangsung lima tahun sekali dan adanya pergantian antar waktu (PAW) yang sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, umumnya jumlah persentase anggota legislatif antar tahun tidak mengalami banyak perubahan, kecuali di tahun politik atau di tahun dilaksanakannya pemilu. Tahun 2023 bukanlah tahun pemilu, sehingga meningkatnya persentase

anggota legislatif perempuan murni dikarenakan adanya mekanisme pergantian antar waktu yang terjadi di internal partai politik.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan dengan ditetapkannya Undang-undang No.10 Tahun 2008. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD Lembaga legislatif. Meski belum mampu memenuhi target yang diharapkan, tapi dengan tren keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung meningkat telah menimbulkan optimisme bahwa peran perempuan di bidang politik semakin nyata terlihat dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.

## b. Dimensi Pengambilan Keputusan

Kaum wanita masih ada yang menganggap bahwa wanita kaum lemah yang selalu butuh perlindungan laki-laki. Makanya masih ada yang menganggap bahwa wanita tidak layak jadi pemimpin. Dengan alasan bahwa laki-laki langkahnya panjang, pikirannya luas, laki-laki lebih kuat, lebih rasional dan lebih bijak, hal itulah kemungkinan yang menyebabkan perempuan dalam hal-hal kepemimpinan masih tertinggal. Namun saat ini sudah banyak kaum wanita yang menjadi manajer, tenaga profesional dan tenaga teknis, yang dahulu masih sangat langka.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id) (diolah)

**Gambar 1.5** Perkembangan Selisih Dimensi Pengambilan Keputusan Sumatera Selatan, 2019-2023

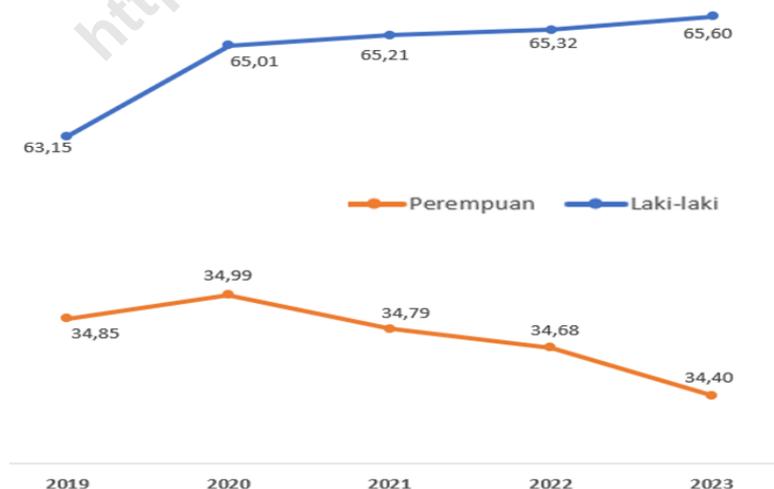
Salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan ialah keterlibatan perempuan di sektor formal. Berdasarkan Gambar 1.5, selisih dimensi pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan justru memperlihatkan angka negatif. Artinya, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sumatera Selatan dari

tahun 2019-2023 lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Kestaraan perempuan sebagai tenaga profesional terjadi ketika capaian yang diperoleh menyentuh angka 50 persen. Meskipun persentase perempuan sebagai tenaga profesional telah melebihi angka 50 persen, justru hal ini menyebabkan *gap* sehingga masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender.

Ketika perempuan telah berdaya dan mandiri, maka dengan sendirinya perempuan akan mampu meningkatkan kemampuannya serta membangun relasi dengan lingkungannya untuk lebih setara dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif perempuan di sektor formal menunjukkan profesionalitas perempuan terhadap pengakuan dunia kerja yang mampu meningkatkan pembangunan nasional, memperkuat kondisi perekonomian, serta mampu memperbaiki kualitas sumberdaya manusia baik diri perempuan, laki-laki maupun keluarga (Karyono, Y., *et.al*, 2019).

### c. Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi

Sumbangan pendapatan perempuan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur capaian indeks pemberdayaan gender. Sumbangan pendapatan perempuan menjadi indikator kontribusi perempuan secara finansial yang merefleksikan kedudukan perempuan dalam dunia kerja dan juga mencerminkan kemandirian perempuan secara ekonomi (Rahmawati, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id)

Gambar 1.6 Persentase Sumbangan Pendapatan Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023

Gambar 1.6 menunjukkan capaian sumbangan pendapatan perempuan yang terus menurun dari tahun 2020 hingga 2023. Sementara capaian sumbangan pendapatan laki-laki terus mengalami peningkatan. Capaian perempuan masih jauh dari capaian yang diperoleh laki-laki. Capaian sumbangan pendapatan perempuan sekitar 34 persen, sementara capaian yang diperoleh laki-laki sekitar 65 persen. Sedangkan pada Gambar 1.7 memperlihatkan selisih dimensi penguasaan sumber daya ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang semakin besar dan menjauhi angka 0. Artinya, kesenjangan capaian upah antara laki-laki dan perempuan semakin menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan kaum perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id) (diolah)

**Gambar 1.7** Perkembangan Selisih Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Sumatera Selatan, 2019-2023

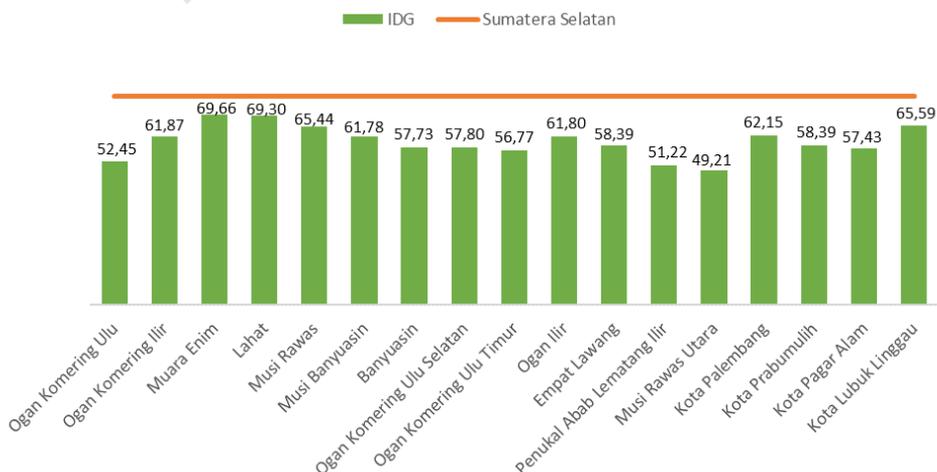
Kesenjangan upah/pendapatan dapat memengaruhi proporsi sumbangan pendapatan perempuan. Hennigusnia (2014) dengan menggunakan data Sakernas BPS tahun 2008-2012 menjelaskan bahwa kesenjangan upah antargender terjadi karena adanya diskriminasi. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan upah dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih ditemukan kurangnya penghargaan terhadap keterampilan perempuan di pasar kerja (Hennigusnia, 2014). Tenaga kerja perempuan juga menghadapi tantangan kultural dan struktural yang cenderung memarginalkan posisi perempuan di pasar kerja. Data Sakernas BPS tahun 1980-2012 menunjukkan rata-rata upah yang diterima buruh/karyawan perempuan 30% lebih rendah dibandingkan dengan buruh/karyawan laki-laki (Vibriyanti, 2013).



Keberadaan sebagian besar angkatan kerja perempuan di sektor informal juga turut memengaruhi kesenjangan pendapatan antargender (Vibriyanti, 2013). Selain para angkatan kerja perempuan cenderung tidak tersentuh oleh UU perlindungan tenaga kerja, mereka juga umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan memungkinkan makin lebarnya jurang kesenjangan upah/pendapatan (Pirmana, 2006). Menurut Miki dan Yuval (2011), perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih dapat bersaing di pasar kerja dibanding mereka yang berpendidikan rendah untuk jenis pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya, Wahyuni dan Monika (2016) mengemukakan investasi pada bidang pendidikan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas angkatan kerja perempuan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi bias gender pada pendapatan.

### Disparitas Antar Wilayah

Gambar 1.8 mengilustrasikan capaian IDG kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dapat dicermati bahwa semua kabupaten/kota nilai IDGnya masih di bawah nilai IDG provinsi. Hal ini dikarenakan persentase perempuan di legislatif untuk kabupaten/kota masih di bawah angka provinsi, bahkan masih ada yang bernilai 0 persen. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan capaian IDG tertinggi yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Lubuk Linggau. Sebaliknya, tiga daerah dengan capaian IDG terendah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id)

**Gambar 1.8** Capaian IDG Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2023

Kabupaten Musi Rawas Utara capaian IDGnya paling rendah. Selain karena daerah tersebut masih merupakan daerah tertinggal dan daerah pemekaran, indikator IDG yang dimiliki masih jauh dari kesetaraan gender (peran laki-laki dan perempuan masih timpang) sehingga membuat pembangunan gender belum dirasakan oleh masyarakat setempat. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selain sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, indikator IDG terutama dimensi partisipasi politik masih jauh dari kesetaraan gender dimana partisipasi perempuan di legislatif tidak ada. Sementara untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, meskipun bukan merupakan daerah pemekaran dan tertinggal tetapi capaian indikator IDGnya masih jauh dari kesetaraan gender dimana selisih untuk semua dimensi pembentuk IDG terbilang besar yang mengakibatkan kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan semakin lebar.

**Tabel 1.1 Perkembangan Komponen Penyusun IDG Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022-2023**

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Keterlibatan di Parlemen				Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi				Sumbangan dalam Pendapatan Kerja				IDG	
	2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022	2023
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ogan Komering Ulu	94,29	5,71	91,43	8,57	40,77	59,23	38,30	61,70	75,93	24,07	75,59	24,41	49,56	52,45
Ogan Komering Ilir	84,44	15,56	84,44	15,56	55,75	44,25	48,35	51,65	75,39	24,61	74,63	25,37	61,26	61,87
Muara Enim	84,44	15,56	84,44	15,56	45,52	54,48	44,42	55,58	62,88	37,12	63,48	36,52	69,99	69,66
Lahat	85,00	15,00	85,00	15,00	44,69	55,31	43,31	56,69	62,78	37,22	63,10	36,90	69,40	69,30
Musi Rawas	80,00	20,00	80,00	20,00	55,87	44,13	43,20	56,80	74,37	25,63	74,32	25,68	65,48	65,44
Musi Banyuasin	93,33	6,67	91,11	8,89	49,19	50,81	39,67	60,33	65,01	34,99	64,26	35,74	60,35	61,78
Banyuasin	88,89	11,11	91,11	8,89	54,99	45,01	41,59	58,41	71,05	28,95	70,60	29,40	60,60	57,73
OKU Selatan	87,50	12,50	87,50	12,50	46,31	53,69	48,07	51,93	76,26	23,74	77,03	22,97	57,81	57,80
OKU Timur	91,11	8,89	93,33	6,67	50,11	49,89	47,52	52,48	70,35	29,65	70,50	29,50	59,65	56,77
Ogan Ilir	85,00	15,00	85,00	15,00	40,00	60,00	43,51	56,49	72,52	27,48	72,55	27,45	61,27	61,80
Empat Lawang	91,43	8,57	94,29	5,71	29,10	70,90	48,06	51,94	65,55	34,45	64,81	35,19	55,03	58,39
PALI	100,00	0,00	100,00	0,00	33,23	66,77	40,06	59,94	62,75	37,25	61,98	38,02	48,09	51,22
Musi Rawas Utara	96,00	4,00	96,00	4,00	51,04	48,96	46,76	53,24	74,51	25,49	73,92	26,08	48,92	49,21
Palembang	92,00	8,00	88,00	12,00	46,20	53,80	50,76	49,24	70,33	29,67	70,71	29,29	57,85	62,15
Prabumulih	84,00	16,00	84,00	16,00	35,83	64,17	36,63	63,37	75,01	24,99	75,03	24,97	58,08	58,39
Pagar Alam	84,00	16,00	84,00	16,00	38,15	61,85	40,86	59,14	78,03	21,97	78,18	21,82	56,69	57,43
Lubuk Linggau	80,00	20,00	80,00	20,00	49,23	50,77	43,73	56,27	72,92	27,08	72,95	27,05	66,28	65,59
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>78,67</b>	<b>21,33</b>	<b>76,00</b>	<b>24,00</b>	<b>46,95</b>	<b>53,05</b>	<b>45,76</b>	<b>54,24</b>	<b>65,32</b>	<b>34,68</b>	<b>65,60</b>	<b>34,40</b>	<b>74,89</b>	<b>76,58</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id)



Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat tujuh kabupaten/kota yang mengalami penurunan capaian IDG dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara kabupaten/kota tersebut, penurunan signifikan dialami oleh Kabupaten OKU Timur. Situasi ini dipengaruhi oleh semakin senjangnya antara capaian laki-laki dengan perempuan pada semua dimensi. Sementara itu, kabupaten/kota lain yang mengalami penurunan IDG umumnya disebabkan oleh meningkatnya persentase kedudukan perempuan sebagai tenaga profesional dan menurunnya persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan. Kondisi ini membuat disparitas pemberdayaan gender semakin lebar dan IDG semakin turun. IDG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim (69,66%) dan IDG terendah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara (49,21%). Jarak yang ditimbulkan dari perbedaan capaian IDG tertinggi dan terendah menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dapat dikatakan, disparitas pembangunan gender di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan semakin mengecil atau membaik.

Selanjutnya kita akan menganalisis disparitas kabupaten/kota dengan mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada posisi geografis dari masing-masing kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Selatan, dengan mempertimbangkan arah utara, selatan, timur, dan barat, serta pengelompokan kota secara terpisah sebagai entitas administratif.

#### Dasar Pembagian Zona Wilayah

1. Utara:
  - Wilayah di bagian utara provinsi Sumatera Selatan.
  - Berbatasan dengan provinsi Jambi di utara dan sebagian wilayah Musi Banyuasin yang meluas ke utara.
2. Selatan:
  - Wilayah di bagian selatan provinsi.
  - Berbatasan dengan provinsi Lampung di selatan dan sebagian wilayah yang cenderung lebih ke selatan dari pusat provinsi.
3. Timur:
  - Wilayah di bagian timur provinsi.
  - Berbatasan dengan provinsi Bangka Belitung di timur dan beberapa wilayah yang lebih ke arah timur dari pusat provinsi.
4. Barat:
  - Wilayah di bagian barat provinsi.
  - Berbatasan dengan provinsi Bengkulu di barat dan beberapa wilayah yang lebih ke arah barat dari pusat provinsi.

5. Kota:

- Wilayah perkotaan yang termasuk kota administratif.
- Merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan sosial di provinsi.

Utara : Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Pali

Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten OKU Timur

Timur : Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir

Barat : Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan

Kota : Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam

Tabel 1.2 menggambarkan evolusi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dari tahun 2019 hingga 2023. Analisis ini mengelompokkan kabupaten dan kota berdasarkan posisi geografis: Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Kota, serta memberikan wawasan penting mengenai perubahan dan tren dalam pemberdayaan gender di berbagai wilayah tersebut.

**Tabel 1.2 Evolusi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Posisi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Enim				
2	Lahat	Lahat	Lahat	Lahat	Lahat
3	OKI	Banyuasin	Musi Rawas	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau
4	Banyuasin	Ogan Ilir	Lubuk Linggau	Musi Rawas	Musi Rawas
5	Ogan Ilir	OKI	Banyuasin	Ogan Ilir	Palembang
6	Muba	Muba	Prabumulih	OKI	OKI
7	Prabumulih	Prabumulih	OKI	Banyuasin	Ogan Ilir
8	OKU Timur	Lubuk Linggau	Muba	Muba	Muba
9	Palembang	OKU Timur	Ogan Ilir	OKU Timur	Empat Lawang
10	Pagar Alam	Musi Rawas	Empat Lawang	Prabumulih	Prabumulih
11	Musi Rawas	Palembang	OKU Timur	Palembang	OKU Selatan
12	Empat Lawang	Empat Lawang	Pagar Alam	OKU Selatan	Banyuasin
13	Lubuk Linggau	Pagar Alam	Patembang	Pagar Alam	Pagar Alam
14	OKU Selatan	OKU Selatan	OKU Selatan	Empat Lawang	OKU Timur
15	PALI	OKU	OKU	OKU	OKU
16	OKU	PALI	PALI	Muratara	PALI
17	Muratara	Muratara	Muratara	PALI	Muratara



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id) (diolah)

Sepanjang 2019-2023 wilayah barat cenderung memiliki capaian IDG lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini mengindikasikan upaya dan stabilitas yang dapat menjadi model bagi wilayah lain yang menghadapi tantangan lebih besar. Sementara untuk kabupaten di wilayah utara, selama lima tahun terakhir capaian IDGnya masih rendah dan memiliki posisi yang terus menurun setiap tahunnya, menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi pemberdayaan gender yang ada. Untuk kabupaten wilayah timur, capaian IDG masing-masing kabupaten memiliki besaran dan posisi yang tidak berbeda jauh (berdekatan). Sedangkan untuk wilayah selatan dan kota, pola yang diperlihatkan pada tabel di atas beragam. Capaian IDG wilayah kota pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah selatan, menunjukkan stabilitas namun masih banyak ruang untuk peningkatan.

### Faktor-faktor yang Memengaruhi Perbedaan IDG Antarwilayah

Untuk melihat secara detail *gap* capaian laki-laki dan perempuan pada dimensi pembentuk IDG yang memperlihatkan disparitas antar wilayah, dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini. Semakin kecil *gap* antara laki-laki dan perempuan untuk setiap dimensinya, semakin baik posisi wilayah tersebut.

**Tabel 1.3 Evolusi *Gap* Antara Laki-laki dan Perempuan pada Dimensi Partisipasi Politik Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Posisi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Enim	Prabumulih	Muara Enim	Musi Rawas	Musi Rawas
2	Prabumulih	Pagar Alam	Musi Rawas	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau
3	Pagar Alam	OKI	Prabumulih	Prabumulih	Prabumulih
4	OKI	Muara Enim	Pagar Alam	Pagar Alam	Pagar Alam
5	Lahat	Lahat	OKI	OKI	OKI
6	Ogan Ilir	Ogan Ilir	Lahat	Muara Enim	Muara Enim
7	Musi Rawas	Lubuk Linggau	Ogan Ilir	Lahat	Lahat
8	OKU Selatan	Musi Rawas	Lubuk Linggau	Ogan Ilir	Ogan Ilir
9	Banyuasin	Banyuasin	OKU Selatan	OKU Selatan	OKU Selatan
10	Lubuk Linggau	OKU Selatan	Banyuasin	Banyuasin	Palembang
11	OKU Timur	OKU Timur	OKU Timur	OKU Timur	Muba
12	Empat Lawang	Empat Lawang	Empat Lawang	Empat Lawang	Banyuasin
13	Palembang	Palembang	Palembang	Palembang	OKU
14	Muba	Muba	Muba	Muba	OKU Timur
15	OKU	OKU	OKU	OKU	Empat Lawang
16	Muratara	Muratara	Muratara	Muratara	Muratara
17	PALI	PALI	PALI	PALI	PALI

Utara  
Selatan



Timur  
Barat



Kota



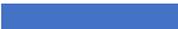
Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id) (diolah)

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir, sebagian besar wilayah kota (kecuali Kota Palembang) memiliki *gap* yang lebih kecil pada dimensi partisipasi politik dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2019, Kota Lubuk Linggau memiliki *gap* yang cukup lebar. Namun *gap* ini mulai mengecil dan membaik sehingga menaikkan posisi setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen untuk wilayah kota sudah mulai banyak. Sementara untuk kabupaten di wilayah utara, *gap* pada dimensi partisipasi politik lebih besar dibandingkan wilayah lain. Artinya, persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sedikit, dan bahkan masih ada kabupaten yang belum memiliki keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk kabupaten wilayah barat, pola yang diperlihatkan pada tabel di atas cukup beragam. Untuk wilayah selatan, *gap* capaian laki-laki dan perempuan masih cukup lebar dan posisi yang dimiliki cenderung *stagnan* dan menurun. Sedangkan untuk wilayah timur, selama lima tahun terakhir menandakan adanya penurunan posisi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama Kabupaten Ogan Ilir.

**Tabel 1.4 Evolusi *Gap* Antara Laki-laki dan Perempuan pada Dimensi Pengambilan Keputusan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Posisi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Empat Lawang	Empat Lawang	PALI	Empat Lawang	Prabumulih
2	Ogan Ilir	Pagar Alam	Ogan Ilir	PALI	OKU
3	OKU Selatan	Ogan Ilir	Lahat	Prabumulih	Muba
4	Lahat	Lahat	Empat Lawang	Pagar Alam	PALI
5	Musi Rawas	PALI	Muratarra	Ogan Ilir	Pagar Alam
6	Pagar Alam	OKI	OKU Selatan	OKU	Banyuasin
7	OKU	OKU	OKU Timur	Musi Rawas	Musi Rawas
8	Muara Enim	Prabumulih	OKI	OKI	Lahat
9	Prabumulih	OKU Selatan	Pagar Alam	Lahat	Ogan Ilir
10	Muratarra	OKU Timur	OKU	Banyuasin	Lubuk Linggau
11	PALI	Musi Rawas	Musi Rawas	Muara Enim	Muara Enim
12	Palembang	Muara Enim	Prabumulih	Palembang	Muratarra
13	OKU Timur	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	OKU Selatan	OKU Timur
14	Banyuasin	Banyuasin	Palembang	Muratarra	Empat Lawang
15	OKI	Muratarra	Muara Enim	Muba	OKU Selatan
16	Lubuk Linggau	Palembang	Banyuasin	Lubuk Linggau	OKI
17	Muba	Muba	Muba	OKU Timur	Palembang

Utara		Timur	
Selatan		Barat	
		Kota	

Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id) (diolah)





Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa selama lima tahun terakhir posisi *gap* dimensi pengambilan keputusan pada sebagian besar wilayah utara mengalami perubahan yang berfluktuatif, tetapi posisi tersebut menuju arah yang lebih baik. Untuk wilayah selatan, pola yang diperlihatkan pada tabel cukup beragam. Kabupaten OKU Selatan posisi *gap* dimensi pengambilan keputusan semakin menurun, artinya *gap* capaian laki-laki dan perempuan pada dimensi ini cenderung melebar dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Sementara untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan adanya perbaikan posisi. Untuk wilayah timur, cenderung mengalami penurunan posisi setiap tahunnya. Untuk wilayah barat pola yang ditunjukkan juga beragam. Posisi Kabupaten Empat Lawang turun jauh di tahun 2023 dimana tahun-tahun sebelumnya memiliki posisi yang paling baik. Begitupun dengan Kabupaten Lahat. Sementara untuk Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas mengalami fluktuatif posisi. Sedangkan untuk wilayah kota, sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan posisi, tetapi mulai tahun 2022 dan 2023 pada umumnya mengalami perbaikan posisi (kecuali Kota Palembang di tahun 2023). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, posisi ini akan membaik jika *gap* capaian laki-laki dan perempuan yang menduduki tenaga profesional semakin mengecil. Untuk kabupaten/kota yang mengalami penurunan posisi lebih diakibatkan karena semakin besarnya perempuan yang menduduki tenaga profesional sehingga *gap* yang terjadi semakin melebar.

Berbeda dengan dua tabel evolusi *gap* sebelumnya dimana hampir semua kabupaten/kota selama lima tahun terakhir mengalami perubahan posisi yang beragam, untuk *gap* capaian laki-laki dan perempuan pada sumbangan pendapatan posisinya cenderung tidak berubah jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa *gap* yang terjadi pada semua kabupaten/kota memiliki pola yang hampir sama. Kesenjangan upah/pendapatan selama lima tahun terakhir masih terjadi, yang bisa diakibatkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan di pasar tenaga kerja, adanya tantangan kultural dan struktural, serta masih banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal.

**Tabel 1.5 Evolusi *Gap* Antara Laki-laki dan Perempuan pada Dimensi Pengambilan Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Posisi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lahat	Lahat	PALI	PALI	PALI
2	PALI	PALI	Lahat	Lahat	Lahat
3	Muara Enim				
4	Muba	Muba	Muba	Muba	Muba
5	Empat Lawang				
6	OKU Timur	OKU Timur	Palembang	Palembang	OKU Timur
7	Palembang	Palembang	OKU Timur	OKU Timur	Banyuasin
8	Banyuasin	Banyuasin	Banyuasin	Banyuasin	Palembang
9	Ogan Ilir				
10	Lubuk Linggau				
11	Muratara	Muratara	Musi Rawas	Musi Rawas	Muratara
12	Musi Rawas	Musi Rawas	Muratara	Muratara	Musi Rawas
13	OKI	OKI	OKI	Prabumulih	OKI
14	OKU	OKU	Prabumulih	OKI	Prabumulih
15	Prabumulih	Prabumulih	OKU	OKU	OKU
16	OKU Selatan				
17	Pagar Alam				

Utara		Timur	
Selatan		Barat	
		Kota	

Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id) (diolah)

Secara umum, disparitas dalam pemberdayaan gender antarwilayah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya lokal, kebijakan pemerintah daerah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ekonomi. Faktor-faktor ini secara kolektif memengaruhi kemajuan menuju pencapaian kesetaraan gender di setiap wilayah.

### a. Norma Budaya Lokal

Budaya patriarki menjadi faktor yang masih kuat dalam ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki memperlihatkan bahwasanya laki-laki lebih mendominasi, berkuasa dan menjadi peran sentral. Budaya patriarki merupakan konstruksi sosial yang sudah terbangun di lingkungan masyarakat sangat sulit untuk dihilangkan terutama pada masyarakat yang masih memiliki pemikiran konvensional dan memiliki efek merugikan salah satu pihak gender, terutama perempuan yang nantinya juga berdampak pada proses dan hasil pembangunan.

Budaya patriarki yang masih kental dan juga stereotipe yang terbangun di lingkungan masyarakat menjadikan peran perempuan untuk muncul dalam sektor



publik masih mengalami kendala. Hal ini juga yang akhirnya berpengaruh pada pengukuran IDG. Perempuan yang hanya diberikan peran domestik bahkan memiliki peran ganda menjadikan kesenjangan sosial yang terbangun semakin tinggi dan suatu keharusan bagi perempuan apa yang dilakukan seolah-olah menjadi kewajiban yang sebenarnya untuk hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja namun bisa laki-laki kecuali memang hal kodrati yang menjadi takdir yang dimiliki oleh perempuan.

Berdasarkan hasil Pemilu di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam parlemen sangat sedikit. Kondisi ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia yang masih erat, dimana Indonesia masih memposisikan laki-laki sebagai icon dalam politik (KPPA, 2020). Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, dimana terlihat masih rendahnya persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan ialah perempuan itu sendiri yang masih ragu untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai anggota dewan karena adanya kekhawatiran terjebak pada tindakan yang melanggar hukum serta melanggar moralitas (Umagapi, 2020).

#### **b. Kebijakan Pemerintah Daerah**

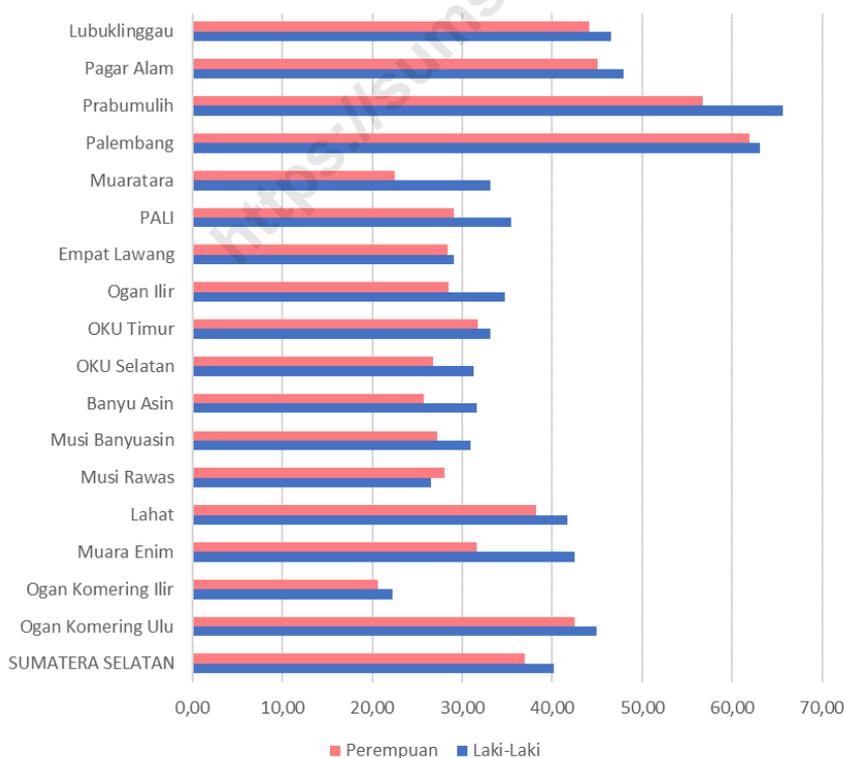
Kesetaraan gender yang ada pada suatu daerah berbeda satu sama lain. Salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan yang ada seperti kebijakan pemerintah, terutama dalam pemerataan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah pada bidang tersebut perlu didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat hingga saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Untuk mengevaluasi sejauh mana prioritas pembangunan sudah responsif gender dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari analisa terhadap data terpilah gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

#### **c. Akses Pendidikan**

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, karena dari perempuan menghasilkan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Oleh sebab itu,

pemberdayaan perempuan merupakan sarana agar perempuan lebih berkualitas dan dapat mencapai kesetaraan gender. Berbicara mengenai peran perempuan dalam sektor publik masih sangat minim karena perempuan selalu identik dengan peran domestik, salah satunya dalam sektor ketenagakerjaan jauh dari kata setara. Perempuan dianggap kurang berpengalaman dan memiliki keterampilan yang lebih rendah sehingga jauh tertinggal dibanding laki-laki. Perbedaan ini tak lain muncul selain karena budaya patriarki juga akses pendidikan bagi perempuan yang masih kurang sehingga memengaruhi keterampilan dan juga peluang karir mereka.

Peningkatan pemberdayaan perempuan juga dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan kaum perempuan. Pendidikan perempuan dapat berdampak pada keseluruhan bangsa karena perempuan berpendidikan biasanya memiliki pendapatan lebih tinggi, lebih aktif secara politik, serta peduli terhadap kesehatan dan pendidikan untuk generasi selanjutnya. Salah satu kebijakan pada bidang pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun yang mendukung peningkatan capaian harapan dan rata-rata lama sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id)

**Gambar 1.9** Persentase Penduduk Usia 25 Tahun keatas dengan Pendidikan SMA ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/kota, Tahun 2023



Dari Gambar 1.9 terlihat bahwa persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas lebih banyak ditemui di wilayah yang berstatus kota. Daerah dengan status kota di Sumatera Selatan memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan lebih mudah dibandingkan dengan wilayah yang berstatus kabupaten. Kondisi ini disebabkan karena kemudahan dalam mengakses ke sarana pendidikan karena pengaruh jarak, ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, dan pengaruh pola pemikiran masyarakat akan pentingnya pendidikan di masa mendatang.

#### **d. Akses Kesehatan**

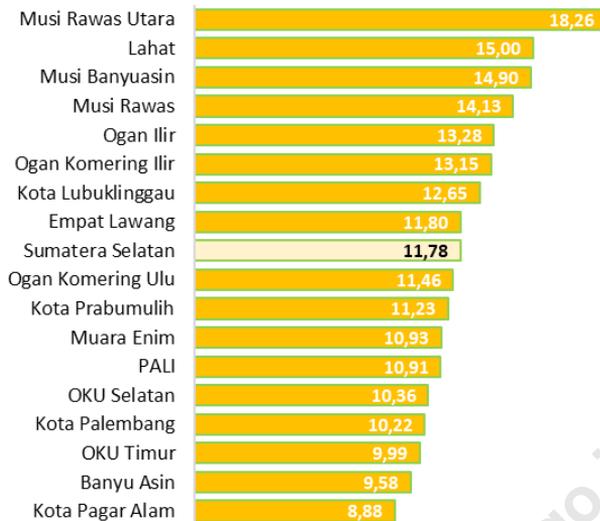
Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan (sirusa.bps.go.id).

Dalam sektor kesehatan, Sumatera Selatan harus fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

#### **e. Kondisi Ekonomi**

Keterlibatan perempuan bukan hanya pada urusan domestik di rumah, namun juga urusan pada perekonomian keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, perempuan ikut dalam membantu pendapatan keluarga. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi mulai dari memang kebutuhan ekonomi yang kurang sehingga perempuan ikut berkontribusi ataupun memang perempuan yang berfokus pada sektor publik sehingga bekerja menjadi hal yang penting dan nyaman dalam kehidupannya.

Kondisi perekonomian masyarakat didekati dengan melihat angka penduduk miskin. Gambar 1.10 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jika dikaitkan dengan data IDG yang ada, Kabupaten Musi Rawas Utara juga memiliki angka IDG terendah selama lima tahun terakhir. Kondisi kemiskinan yang ada di kabupaten tersebut mempengaruhi masih rendahnya capaian sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, [sumsel.bps.go.id](https://sumsel.bps.go.id)

Gambar 1.10 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2023

### Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peranan gender pada bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Ketika terjadi ketimpangan atau ada satu kelompok yang capaian pemberdayaannya jauh di atas yang lain (baik perempuan maupun laki-laki), maka nilai IDG akan jauh dari 100.
2. Kenaikan indikator IDG menggambarkan peningkatan perempuan sekaligus pengurangan peran laki-laki.
3. Adanya praktik diskriminasi dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan yang masih minim partisipasi.
4. Selama lima tahun terakhir IDG Sumatera Selatan meningkat secara konsisten, meskipun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
5. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif cenderung stagnan, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Angka ini sangat tergantung terhadap pemilihan umum yang berlangsung lima tahun sekali dan adanya pergantian antar waktu (PAW) yang sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik peserta pemilu.

6. Kesenjangan (*gap*) pada dimensi pengambilan keputusan adalah yang paling kecil dibandingkan dengan *gap* pada dua dimensi lainnya. Kondisi perempuan di Sumatera Selatan yang menduduki tenaga profesional telah mendekati kesetaraan dan mulai menandakan adanya pemberdayaan gender.
7. Capaian sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena semakin lebarnya kesenjangan upah/pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan masih menghadapi tantangan kultural dan struktural yang cenderung memarginalkan posisi perempuan di pasar kerja. Selain itu, sebagian besar angkatan kerja perempuan terserap di sektor informal, dan rendahnya tingkat pendidikan memungkinkan makin lebarnya jurang kesenjangan upah/pendapatan.
8. Disparitas capaian pemberdayaan gender antarwilayah di Sumatera Selatan masih cukup besar.

Untuk mencapai kesetaraan gender di Sumatera Selatan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, diperlukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kesetaraan gender dan menghilangkan kontruksi sosial yang terbentuk di masyarakat sehingga dalam hal kegiatan ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan tidak ada jurang pemisah yang membedakan.
2. Memperjelas regulasi yang mewajibkan pemberdayaan perempuan dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
3. Sistem dalam pemilu yang awalnya sistem keterpilahan calon mungkin bisa dipertimbangkan untuk diubah menjadi sistem proporsional tertutup dengan mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam dunia kerja dan peningkatan kemampuan (keahlian) dan keterampilan perempuan dalam segala bidang.
5. Menghapus segala bentuk diskriminasi upah dalam pekerjaan dengan melakukan perumusan kebijakan yang responsif gender serta perlindungan hukum bagi angkatan kerja perempuan.
6. Setiap daerah perlu memiliki Perda Pengarusutamaan Gender. Dengan adanya Perda tersebut akan semakin memperkuat dan mengikat para pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah.



Harapannya, dengan adanya Perda tersebut perempuan bisa lebih terbuka dalam berekspresi. Termasuk dalam keterlibatan di Lembaga keterwakilan pemerintah. Selain itu, agar masyarakat marjinal seperti penduduk miskin, pengangguran, perempuan, disabilitas, dan lansia semakin jadi prioritas dalam penyusunan kebijakan, perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

7. Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesetaraan gender. Karenanya, semua harus berkomitmen mewujudkannya guna meningkatkan IDG.

<https://sumsel.bps.go.id>



# Daftar Pustaka

- Alfiana, M. A. F. dkk. 2015. Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia. *In Seminar Geografi UMS*.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2024a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Selatan. Accessed June 24, 2024. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/40/907/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-provinsi-sumatera-selatan.html>
- BPS Provinsi Sumatera Selatan 2024b. Tabel/Indikator Gender Sumatera Selatan. Accessed June 24, 2024. <https://sumsel.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- Dini, I. M. Fajriyah, Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. 2020. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Publikasi Badan Pusat Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Hennigusnia. 2014. Kesenjangan Upah Antar Gender di Indonesia: Glass Ceiling atau Sticky Floor? *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2), 83-96. doi:10.14203/jki.v9i2.37
- Karyono, Y. dkk. 2019. *Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018*. From Publikasi Badan Pusat Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) & Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Miki, M. & Yuval, F. 2011. Using Education to Reduce the Wage Gap Between Men and Women. *The Journal of Socio-Economics*, 40, 412-416. doi:10.1016/j.socec.2011.04.006
- Nugroho, R. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. 1<sup>st</sup> ed.* Eds. Wisnu Winardi, Yoyo Karyono, Sylvianti Angraini, and Anugrah Pambudi Raharjo. Jakarta: KPPPA-BPS.
- Pirmana, V. 2006. Earnings Differential Between Male-Female in Indonesia: Evidence from Sakenas Data. *Working Paper in Economics and Development Studies*, No. 200608.
- Rahmawati, D. N, dkk. 2018. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Kemen PPPA dan BPS.
- Tupamahu, M. K. 2020. Perempuan Dalam Pembangunan berwawasan Gender: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Fenomenologis. *Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 2(05), 128-134.
- Umagi, J. L. 2020. Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: *Tantangan dan Peluang*, 25(1), 19-34.

- 
- UNDP. 1995. Human Development Report 1994. *In American Journal of Economics and Sociology* (Vol.54, Issue 1). <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.1995.tb02630.x>
- UNDP. 2016. *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. UNDP, New York.
- Vibriyanti, D. 2013. Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Ekonomi: Analisis Data Sakernas 1980-2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 1-16, doi:10.14203/jki.v8i1.18
- Wahyuni, R.N.T. & Monika, A.K. 2016. Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 15-28. Doi: 10.14203/jki.v11i1.63
- Widiastuty, I. L. 2019. Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 105-118.
- Wisnujati, N. S. (n.d.).2020. *Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro*. 20(2), 67-81.
- WHO. 2024. Human Development Report 2023/2024 Technical Notes.
- Wood, Julia. 2005. *Gendered Lives: Communication, Gender & Gender*. Canada: Wadworth Publishing.
- Yuslin, Hasnidar. 2021. Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162-170. <http://dx.doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>
- 



# 2

## Analisis Ketimpangan Gender di Sumatera Selatan: Indikator, Tren, dan Disparitas Antarwilayah

Financy Ramadhani, S.ST., M.E.K.K





# Analisis Ketimpangan Gender di Sumatera Selatan: Indikator, Tren, dan Disparitas Antarwilayah

## Kesetaraan Gender: Mengapa Penting dan Bagaimana Cara Mengukurnya?

Kesetaraan gender digambarkan sebagai keadaan di mana semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Kesetaraan gender adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesetaraan gender serta partisipasi efektif perempuan juga penting bagi semua aspek pembangunan berkelanjutan (Martinez-Martinez, *et al.*, 2021)

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, perempuan dan laki-laki masih mengalami perbedaan signifikan dalam akses, peluang, dan perlakuan di berbagai aspek kehidupan. Dari pendidikan hingga kesehatan, dari partisipasi ekonomi hingga keterwakilan politik, ketimpangan ini mempengaruhi setiap aspek kesejahteraan manusia dan perkembangan masyarakat. Misalnya, penelitian Chaudhry (2007) di Pakistan menunjukkan ketimpangan gender dalam pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan awal secara signifikan mengurangi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Napitupulu dan Ekawaty (2022) dalam penelitiannya juga mendapatkan kesimpulan bahwa ketimpangan gender memiliki hubungan dengan ekonomi makro, dimana upaya dalam pengurangan ketimpangan gender akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

Mencapai kesetaraan gender sangat penting tidak hanya untuk keadilan dan hak asasi manusia tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan (Pane, *et al.*, 2024). Oleh karena itu, wajar bahwa kesetaraan gender dimasukkan sebagai salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini menjadi cerminan pengakuan global akan pentingnya kesetaraan gender. Kajian mengenai hubungan antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi juga telah banyak dilakukan. Seguino (2008), misalnya, dalam penelitiannya menyatakan bahwa perluasan



kesempatan pekerjaan yang diberikan untuk setiap gender memberikan dampak yang positif bagi kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam perdagangan internasional.

Memahami dan mengatasi ketimpangan gender memerlukan pengukuran yang tepat. Alat pengukuran ketimpangan gender, seperti *Gender Inequality Index* (GII) yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), membantu dalam mengumpulkan data penting untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif. GI memberikan gambaran mengenai dimensi ketidaksetaraan dalam kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi (UNDP, 2010). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadaptasi GI untuk menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG), indikator yang digunakan dalam penghitungan juga disesuaikan dengan data nasional yang tersedia. IKG memberikan wawasan spesifik tentang kondisi kesetaraan gender di Indonesia, memungkinkan analisis yang lebih tepat sasaran dalam konteks lokal.

Pertanyaannya, bagaimana tren ketimpangan gender di Sumatera Selatan? Apakah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren ketimpangan gender di Sumatera Selatan, mengevaluasi komponen-komponen yang membentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta mengidentifikasi disparitas ketimpangan gender antarwilayah di Sumatera Selatan. Pertama, tulisan ini akan mengkaji perubahan dalam komponen IKG selama enam tahun terakhir untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan atau peningkatan ketimpangan gender. Kedua, artikel ini akan mengevaluasi perbedaan dalam akses kesehatan reproduksi, pendidikan, dan partisipasi pasar tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Terakhir, penelitian ini akan mengidentifikasi disparitas antarwilayah dalam ketimpangan gender untuk memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor lokal mempengaruhi kesetaraan gender di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Dengan pendekatan ini, tulisan ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang perkembangan kesetaraan gender serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender di berbagai wilayah di Sumatera Selatan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ketimpangan gender menggunakan suatu indeks yang disebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks ini diadaptasi dari *Gender Inequality Index* (GII) yang dikembangkan oleh UNDP, tetapi disesuaikan dengan data yang tersedia di Indonesia. GI sendiri berfokus pada





pengukuran ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja dan menunjukkan hilangnya potensi pembangunan manusia akibat ketimpangan capaian antara laki-laki dan perempuan pada dimensi-dimensi tersebut (UNDP, 2010). Sebagaimana GII, IKG juga berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Perbedaan utama antara GII dan IKG terletak pada indikator yang digunakan untuk menyusun masing-masing dimensi. Untuk dimensi kesehatan reproduksi, UNDP menggunakan Angka Kematian Ibu dan Tingkat Fertilitas Remaja sebagai indikator utama. Sementara itu, BPS menggunakan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir di luar fasilitas kesehatan serta proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun. Indikator-indikator ini dipilih karena data yang digunakan oleh UNDP tidak selalu tersedia secara berkelanjutan setiap tahun di Indonesia (BPS, 2023).

Dalam dimensi pemberdayaan, terdapat juga perbedaan dalam indikator yang digunakan. UNDP mengukur pemberdayaan melalui persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan ijazah minimal SMP atau sederajat. Sebaliknya, BPS memilih untuk menggunakan batasan SMA ke atas dan sederajat untuk mencerminkan kondisi pendidikan yang lebih tinggi (BPS, 2023). Perubahan ini penting karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpotensi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pemberdayaan perempuan di Indonesia. Sementara itu, dalam dimensi pasar tenaga kerja, baik GII maupun IKG sama-sama menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki.

Dengan penyesuaian-penyesuaian ini, IKG diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dan akurat tentang kondisi ketimpangan gender di Indonesia, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan merancang intervensi yang dapat mengurangi ketimpangan gender secara signifikan.

## Dimensi dan Indikator IKG

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan alat ukur yang penting untuk menilai tingkat ketimpangan gender dalam suatu masyarakat. Pengukuran IKG didasarkan pada tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Pemilihan ketiga dimensi ini didasarkan pada kontribusi signifikan masing-masing dimensi terhadap gambaran keseluruhan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan dalam masyarakat.

### a. Dimensi Kesehatan Reproduksi

Dimensi kesehatan reproduksi mencakup dua indikator utama: proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir di luar fasilitas kesehatan, dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun. Indikator pertama, yaitu proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, mengukur akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang memadai selama persalinan. Dikarenakan sebagian besar komplikasi ibu terjadi di sekitar waktu melahirkan (Budiarso, *et al.*, 1996), maka penting bagi ibu yang akan melahirkan untuk memilih tempat persalinan yang aman dan bersih. Persalinan di luar fasilitas kesehatan sering kali terkait dengan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu serta bayi, yang menunjukkan ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi.

Indikator kedua, yaitu proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, mencerminkan risiko kesehatan yang dihadapi oleh remaja perempuan yang melahirkan pada usia dini. Kehamilan pada usia muda dapat menimbulkan dampak pada kesehatan ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah. Kejadian lahir mati dan kematian bayi baru lahir 50% lebih tinggi pada bayi yang lahir dari ibu remaja dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun. Bayi dari ibu remaja juga lebih cenderung memiliki berat badan lahir rendah, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan mereka (WHO, 2014). Kehamilan yang terjadi pada sebelum usia 20 tahun juga memiliki konsekuensi sosial-ekonomi, yang paling menonjol dari masalah kehamilan tersebut adalah terputusnya/tertundanya sekolah/kuliah, meningkatnya ketergantungan finansial pada orangtua atau anggota keluarga lain, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri (Khisbiyah, 1994).



## b. Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan diukur melalui dua indikator utama: persentase kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan dan persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal SMA.

Indikator pertama yakni persentase kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan, yang mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik perempuan yang rendah mencerminkan ketimpangan gender dalam akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik, yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang adil dan inklusif. Saint-Germain (1989) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan memang membuat perbedaan dalam badan legislatif negara bagian. Para anggota legislatif perempuan secara proporsional mengusulkan lebih banyak undang-undang yang mengutamakan kepentingan perempuan dibandingkan legislator laki-laki.

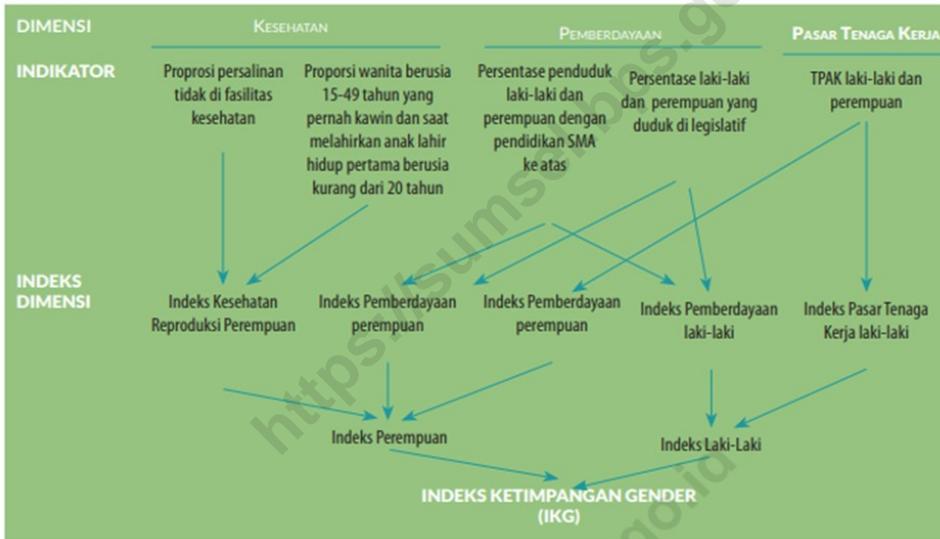
Indikator kedua, yaitu persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal SMA, mengukur tingkat akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pemberdayaan perempuan, karena pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang lebih besar untuk pekerjaan yang lebih baik dan partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Studi literatur yang dilakukan oleh Tasia dan Nurhasanah (2019) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi pada perempuan berpengaruh positif pada diri perempuan itu sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Pendidikan tinggi yang diterima oleh perempuan berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Dimana hal-hal tersebut dapat membuka peluang yang lebih lebar bagi perempuan untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik sehingga dapat membawa perubahan sosial dan ekonomi bagi dirinya dan lingkungan.

## c. Dimensi Partisipasi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi partisipasi pasar tenaga kerja mencakup tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur kesetaraan gender dalam akses terhadap lapangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja menunjukkan adanya kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pekerjaannya. Klassen dan Lamanna (2009) mendapatkan kesimpulan pada penelitian mereka pada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) berupa ketimpangan gender pada

partisipasi angkatan kerja memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan dalam partisipasi angkatan kerja sering kali mencerminkan adanya hambatan struktural dan diskriminasi gender di tempat kerja, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi dan sosial perempuan.

Secara keseluruhan, ketiga dimensi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesetaraan gender dalam suatu masyarakat. Dengan mengukur dan menganalisis ketimpangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar tenaga kerja, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan gender dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 2.1 Bagan Dimensi dan indikator IKG

## Ketimpangan Gender di Sumatera Selatan

### a. Tren Ketimpangan Gender

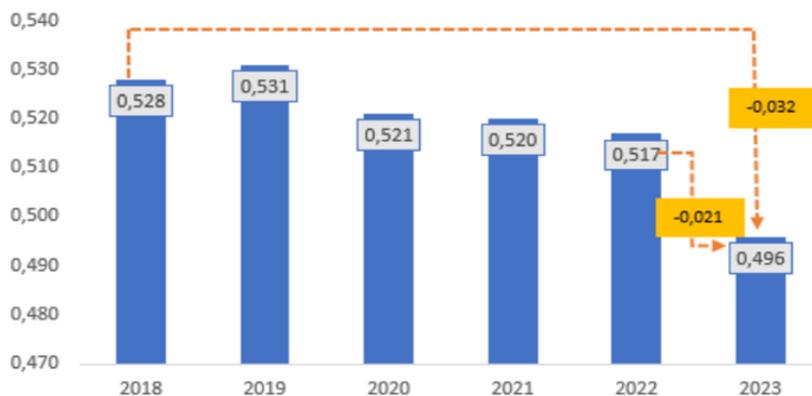
Ketimpangan gender merupakan isu kompleks yang melibatkan interaksi berbagai faktor di tingkat individu, masyarakat, dan wilayah. Pencapaian kesetaraan gender sering kali mencerminkan tradisi, agama, struktur ekonomi, struktur demografis, sistem pendidikan, serta sejarah yang ada dalam masyarakat suatu wilayah. Oleh karena itu, pencapaian kesetaraan gender dapat berbeda-beda di setiap wilayah.



Di Sumatera Selatan, ketimpangan gender menurun secara konsisten dalam enam tahun terakhir, menandakan kesetaraan gender yang semakin membaik. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan sempat mengalami kenaikan di tahun 2019, menandakan hal sebaliknya. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya persentase perempuan yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun, serta turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan di Sumatera Selatan pada periode tersebut.

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan sebesar 0,496, turun sebanyak 0,021 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,517. Sejak tahun 2018, IKG Sumatera Selatan telah mengalami penurunan sebesar 0,032 poin, atau rata-rata turun 0,006 poin per tahun.

Penurunan konsisten dalam IKG Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kebijakan dan inisiatif yang telah diimplementasikan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil yang nyata. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan gender dan meningkatkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada telah berhasil, dan oleh karena itu, memperkuat dan memperluas inisiatif ini dapat membawa hasil yang lebih baik. Misalnya, program yang telah sukses dalam meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dapat diperluas ke lebih banyak sektor atau wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Gambar 2.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018-2023

Meskipun penurunan IKG terlihat lambat, rata-rata penurunan 0,006 poin per tahun menunjukkan bahwa perubahan struktural sedang terjadi. Ini penting karena perubahan yang bertahap dan konsisten sering kali lebih berkelanjutan dibandingkan perubahan yang mendadak. Penurunan konsisten IKG juga menunjukkan pentingnya evaluasi berkala dari kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan penyesuaian atau intervensi tambahan.

Lebih lanjut, penurunan IKG sebesar 0,021 poin dalam setahun menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil baru-baru ini lebih efektif. Ini mungkin mencakup program-program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, meskipun progres terlihat lambat, arah pergerakan yang konsisten dan positif dalam penurunan IKG menunjukkan bahwa Sumatera Selatan berada di jalur yang benar menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Upaya yang berkelanjutan dan evaluasi yang terus-menerus sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan positif ini terus berlanjut dan membawa manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

**Tabel 2.1 Perkembangan Indikator-indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018-2023**

Dimensi	Gender	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kesehatan Reproduksi</b>							
MTF	Perempuan	0,354	0,315	0,301	0,303	0,286	0,237
MHPK20	Perempuan	0,283	0,314	0,311	0,306	0,302	0,304
<b>Pemberdayaan</b>							
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	78,67	78,67	78,38	78,67	78,67	76,00
	Perempuan	21,33	21,33	21,62	21,33	21,33	24,00
Pendidikan SMA ke atas (%)	Laki-laki	33,99	36,03	38,41	37,94	38,77	40,17
	Perempuan	29,10	29,86	33,03	32,99	35,75	36,91
<b>Pasar Tenaga Kerja</b>							
TPAK (%)	Laki-laki	83,25	83,25	82,71	82,66	84,95	85,39
	Perempuan	53,23	51,68	54,25	54,54	53,32	55,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023





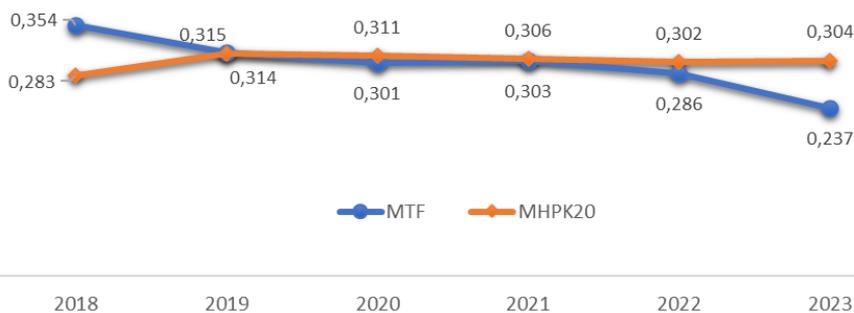
Turunnya nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan tahun 2023 didukung oleh perbaikan pada dimensi pembentuk IKG secara umum. Dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan kecenderungan yang membaik, dimana persentase perempuan yang berisiko buruk dalam hal kesehatan reproduksi semakin menurun. Penurunan ini mencerminkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi di Sumatera Selatan. Dimensi pemberdayaan juga mengalami perbaikan, dimana perkembangan indikator penyusunnya menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan di Sumatera Selatan semakin setara. Peningkatan ini menandakan bahwa lebih banyak perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses ke pendidikan tinggi. Begitu pula dengan dimensi pasar tenaga kerja yang juga mengindikasikan perbaikan seiring semakin meningkatnya persentase perempuan yang masuk ke pasar tenaga kerja. Analisis data dari Tabel 2.1 mengungkapkan beberapa tren signifikan dalam berbagai dimensi yang menyumbang pada penurunan IKG.

## **b. Analisis Komponen IKG**

### **Kesehatan Reproduksi**

Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) merupakan indikator faktor risiko kematian ibu. Perempuan perlu diberikan pengetahuan dan akses ke fasilitas dan layanan tenaga kesehatan dalam proses persalinan untuk menurunkan risiko komplikasi yang dapat terjadi dan dapat membahayakan nyawa perempuan pada saat persalinan. Pada tahun 2018, angka indikator ini bernilai 0,354 poin, atau sekitar 35 persen perempuan usia 15-49 tahun di Sumatera Selatan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, angka tersebut terus menurun, hingga pada tahun 2023, hanya sekitar 23 persen perempuan usia 15-49 tahun di Sumatera Selatan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan. Penurunan ini menunjukkan peningkatan akses dan penggunaan fasilitas kesehatan selama persalinan, yang merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko komplikasi dan kematian ibu serta bayi.

Sementara itu, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun (MHPK20) menunjukkan fluktuasi kecil tetapi relatif stabil selama kurun waktu 2018-2023. Pada tahun 2018, sekitar 28,30 persen perempuan usia 15-49 tahun di Sumatera Selatan melahirkan anak pertamanya pada usia sebelum 20 tahun. Namun, angka ini sedikit mengalami peningkatan menjadi



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

**Gambar 2.3** Perkembangan Indikator Kesehatan Reproduksi di Sumatera Selatan 2018-2023

sekitar 30,40 persen pada tahun 2023. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam beberapa aspek kesehatan reproduksi, tantangan dalam mengurangi angka kehamilan remaja masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, penurunan signifikan dalam proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan menandakan keberhasilan program-program peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu di Sumatera Selatan. Namun, fluktuasi dalam proporsi perempuan yang melahirkan pada usia remaja menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk menangani masalah kehamilan remaja. Kombinasi dari kedua indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan dan tantangan dalam bidang kesehatan reproduksi, yang penting untuk perencanaan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif di masa depan.

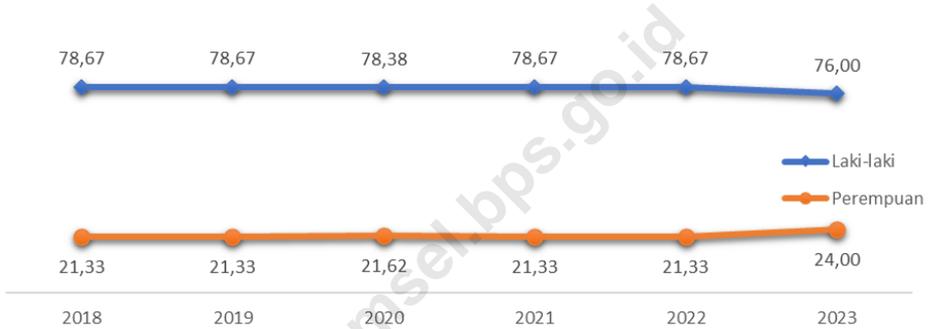
### Pemberdayaan

Adapun dimensi pemberdayaan pada penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dibentuk oleh dua indikator utama, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.

Indikator pertama pada dimensi ini yakni persentase anggota legislatif perempuan, yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan yang terus menerus untuk memastikan hak setiap individu dalam mencapai kesetaraan dan keadilan. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berpihak dan mendukung peningkatan keterwakilan perempuan. Upaya untuk

meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 2008 yang salah satu isinya mensyaratkan bakal calon legislatif dari suatu partai saat Pemilihan Umum haruslah memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Di Sumatera Selatan, persentase perempuan anggota legislatif DPRD adalah sebesar 24,00 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 21,33 persen. Meski demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah tahun 2023 bukanlah tahun pemilu, sehingga peningkatan ini bisa lebih dikarenakan oleh adanya mekanisme perubahan yang terjadi di tubuh badan legislatif itu sendiri.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

**Gambar 2.4** Persentase Anggota Legislatif Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2018-2023

Sementara indikator kedua yaitu persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas, yang mencerminkan modal penduduk dalam hal pendidikan dan menjadi proksi bagi potensi keberdayaannya. Celah yang semakin kecil antara pendidikan laki-laki dan perempuan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan yang setara dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses terhadap pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak lainnya. Ketika semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ini dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perempuan yang berpendidikan lebih tinggi, misalnya, cenderung memiliki lebih banyak pilihan karir dan dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga lebih mungkin untuk menggunakan layanan kesehatan, seperti *prenatal care* dan imunisasi anak, yang berkontribusi pada derajat kesehatan yang lebih baik bagi mereka dan anak-anak

mereka. Pendidikan yang setara juga dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam proses politik. Pendidikan politik dapat memperkuat suara perempuan dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat membantu mempromosikan perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

**Gambar 2.5** Persentase Penduduk 25 Tahun Ke Atas yang Berpendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan, 2018-2023

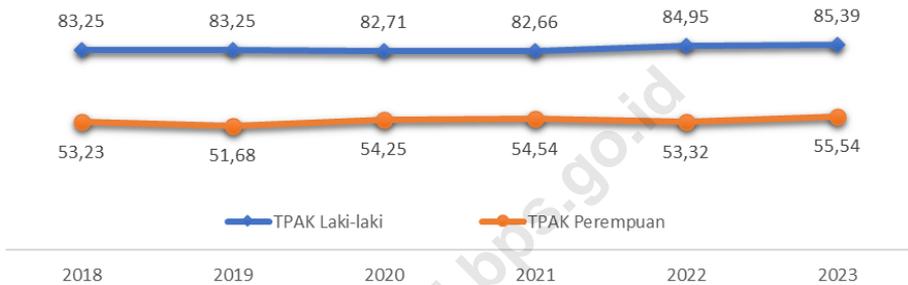
Di Sumatera Selatan, dalam enam tahun terakhir, terjadi tren penurunan gap antara penduduk laki-laki dan perempuan berusia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Tren ini merupakan perkembangan positif bagi kesetaraan gender di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, gap tersebut sebesar 4,89 persen, dengan 33,99 persen laki-laki dan 29,10 persen perempuan yang berpendidikan SMA ke atas. Meskipun gap ini sempat melebar menjadi 6,17 persen pada tahun 2019, setelah itu terus menurun hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, gap ini sedikit naik kembali menjadi 3,26 persen, di mana 40,17 persen laki-laki dan 36,91 persen perempuan berusia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas. Tren penurunan gap ini menunjukkan kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Sumatera Selatan.

### Partisipasi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi ketiga dari pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah dimensi pasar tenaga kerja. Dimensi ini mencerminkan kesetaraan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap sumber ekonomi, terutama lapangan pekerjaan. Indikator yang digunakan dalam dimensi ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk laki-laki dan perempuan. TPAK perempuan dapat



menjadi cerminan kesetaraan gender dalam sebuah masyarakat. Peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki menunjukkan bahwa kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki semakin setara. Di negara-negara di mana perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di luar rumah, hal ini bisa menjadi tanda kemajuan dalam arah kesetaraan gender.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

**Gambar 2.6** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan, 2018-2023

Gap antara TPAK laki-laki dan perempuan diharapkan dapat terus menyempit seiring dengan kemajuan zaman. Di Sumatera Selatan, kondisi gap antara TPAK laki-laki dan perempuan mengalami fluktuasi dalam enam tahun terakhir, seiring dengan kondisi TPAK laki-laki dan perempuan yang juga berfluktuasi. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2022, gap antara TPAK laki-laki dan perempuan di tahun 2023 kembali menurun, dengan TPAK laki-laki sebesar 85,39 persen dan TPAK perempuan sebesar 55,54 persen. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perubahan sosial.

Kesetaraan gender di pasar tenaga kerja dapat diupayakan melalui berbagai langkah, seperti kebijakan yang mendukung pembayaran yang adil, promosi kesetaraan kesempatan karir, penghapusan diskriminasi, dan mengatasi stereotip gender di tempat kerja. Kebijakan pemerintah yang proaktif, inisiatif perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, serta perubahan budaya yang lebih luas dalam masyarakat, semuanya berperan penting dalam mendorong kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.



Implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan di tempat kerja dapat mencakup pelatihan untuk mengatasi bias gender, penyediaan fasilitas yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga, serta penghargaan terhadap perusahaan yang berhasil menerapkan praktik-praktik kesetaraan gender. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di tempat kerja. Sebagai hasilnya, kesetaraan gender di pasar tenaga kerja tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

### **Ketimpangan Gender Antarwilayah di Sumatera Selatan**

Ketimpangan gender sangat bervariasi di berbagai wilayah dalam Sumatera Selatan. Misalnya, pada tahun 2023, Palembang memiliki IKG terendah sebesar 0,324, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesetaraan gender, sementara Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memiliki IKG tertinggi sebesar 0,842, menunjukkan ketimpangan gender yang substansial.

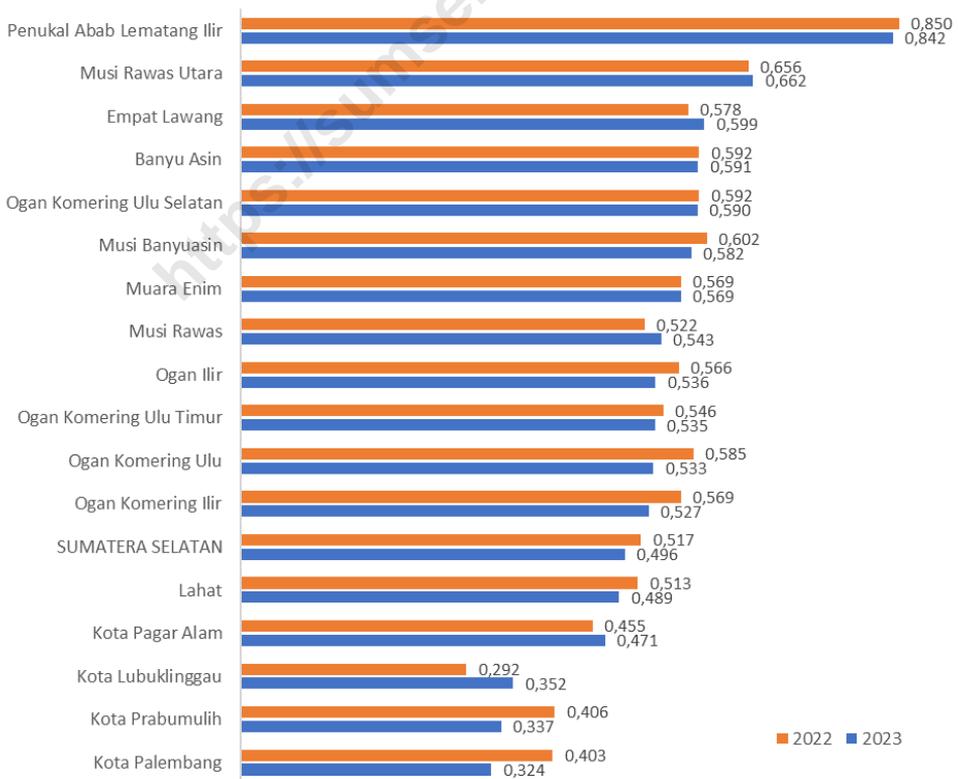
Kondisi ketimpangan gender antar kabupaten/kota bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk budaya lokal, kebijakan pemerintah daerah, akses terhadap sumber daya, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan ekonomi penduduk di wilayah tersebut. Tujuan dari gagasan kesetaraan gender bukan hanya berfokus pada capaian kesetaraan gender yang meningkat di suatu kabupaten/kota saja, melainkan juga untuk mengurangi disparitas kondisi kesetaraan gender antar kabupaten/kota. Pada tahun 2023, wilayah dengan nilai IKG terendah di Sumatera Selatan adalah Kota Palembang, dengan IKG sebesar 0,324. Kota Palembang juga mengalami perbaikan kondisi kesetaraan gender yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, ditandai dengan penurunan IKG terbesar, yakni sebesar 0,079 poin. Sebaliknya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menempati urutan terakhir dengan nilai IKG sebesar 0,842. Hal ini menunjukkan bahwa PALI memiliki tantangan besar dalam mengatasi ketimpangan gender di wilayahnya.

Disparitas antar kabupaten/kota tampak semakin melebar pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022. Sebagaimana telah disebutkan, IKG terendah di tahun 2023 dicapai oleh Kota Palembang, sementara IKG tertinggi dicapai oleh Kabupaten PALI. Perbedaan nilai IKG antara keduanya mencapai 0,518 poin, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana gap nilai IKG tertinggi dan terendah adalah sebesar 0,447 poin.



Peningkatan disparitas ini menandakan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender harus lebih fokus pada daerah-daerah dengan nilai IKG yang tinggi. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan gender di wilayah-wilayah tersebut. Langkah-langkah seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempersempit kesenjangan antara kabupaten/kota.

Dengan demikian, memahami variasi IKG antar wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kunci dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan gender di Sumatera Selatan. Upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

**Gambar 2.7** Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022-2023

## Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Selama enam tahun terakhir, terdapat penurunan signifikan dalam ketimpangan gender di Sumatera Selatan, terutama dalam akses kesehatan reproduksi dan pendidikan. Penurunan proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan mencerminkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu. Meskipun masih ada tantangan dalam mengurangi angka kelahiran pada usia muda, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, peningkatan representasi perempuan dalam badan legislatif dan penyempitan kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan.

Namun, di pasar tenaga kerja, meskipun terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, kesenjangan antara tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan masih signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan struktural yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan penuh di tempat kerja. Terakhir, disparitas ketimpangan gender antarwilayah di Sumatera Selatan masih cukup besar, dengan beberapa wilayah menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dibandingkan yang lain.

Untuk lebih mempercepat kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender di Sumatera Selatan, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan:

1. **Peningkatan Akses Kesehatan Reproduksi:** Memperluas jangkauan layanan kesehatan ibu dan anak, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan untuk mengurangi risiko kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan secara keseluruhan.
2. **Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan:** Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Pendidikan yang lebih baik akan membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan.
3. **Mendorong Partisipasi Politik Perempuan:** Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan dalam badan legislatif dan pemerintahan, serta menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.



- 
4. Kesetaraan di Pasar Tenaga Kerja: Mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan upah dan kesempatan kerja, serta menghapus diskriminasi gender di tempat kerja. Upaya ini harus mencakup langkah-langkah untuk mengatasi stereotip gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang karir.
  5. Pengembangan Kebijakan Lokal: Mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan yang sensitif gender dan menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengurangi ketimpangan gender. Kebijakan yang dirancang khusus untuk menangani isu-isu lokal dapat lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan gender di berbagai wilayah.

Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Sumatera Selatan dapat mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam upaya mengatasi ketimpangan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Implementasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan akan membantu mempercepat perubahan positif dan memastikan bahwa kesetaraan gender tercapai di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

# Daftar Pustaka

- Aeni, N. (2013). Faktor Risiko Kematian Ibu. *KESMAS Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(10), 453-459.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Ketimpangan Gender 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2024. Berita Resmi Statistik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Budiarso, R., Setyowati, T., & Lubis, A. (1996). Kematian Maternal dan Pelayanan Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 1994. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 24(2&3), 108-120.
- Chaudhry, I. S. (2007). Gender Inequality in Education and Economic Growth: Case Study of Pakistan. *Pakistan Horizon*, 60(4), 81-91.
- Deris, L.R.V., Bhinadi, A., & Nuryadin, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-2020. *Sibatik Journal*, 1(12), 2947-2958.
- Kabeer, N. & Natali, L. (2013). Gender Equality and Economic Growth: Is There a Win-Win?. *IDS Working Paper*, 2013(417), 1-58.
- Khisbiyah, Y. (1994). Konsekuensi Psikologis dan Sosial-Ekonomi Kehamilan Tak Dikehendaki pada Remaja. *Populasi*, 5(2), 74-89.
- Klassen, S. & Lamanna, F. (2009). The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91-132.  
<https://doi.org/10.1080/13545700902893106>
- Martínez-Martínez, M., et al. (2021). Awakenings: An authentic leadership development program to break the glass ceiling. *Sustainability (Switzerland)*, 13 (13). <https://doi.org/10.3390/su13137476>
- Maulana, D. (2013). Partisipasi Politik Perempuan dan Kebijakan Publik di Provinsi Banten. *Jurnal Komunikasi*, 2(2), 32-39.
- Mulyono, I. 2010. Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. [Makalah].
- Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(2), 131-143.
- Napitupulu, F. & Ekawaty, M. (2022). Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-negara Asia Timur dan Pasifik. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 29-43. <https://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.4>



- 
- Ningrum, D. N., Gumiarti, & Toyibah, A. (2021). Literature Review: Faktor Kehamilan Remaja. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 16(2), 362-368. <https://doi.org/10.32382/medkes.v16i2.2447>
- Nuraeni, Y. & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Saint-Germain, M.A. (1989). Does Their Difference Make a Difference? The Impact of Women on Public Policy in Arizona Legislature. [Paper].
- Seguino, S. 2008. Micro-Macro Linkages Between Gender, Development, and Growth: Implications for the Caribbean Region. Burlington: University of Vermont.
- Tasia, F.E. & Nurhasanah, E. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Tinggi dan Pengaruh Pendidikan Tinggi pada Perempuan: Sebuah Studi Literatur. *PEKOBIS Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis*, 4(1), 1-12.
- WHO. 2008. Adolescent Pregnancy. *MPS Notes*, 1(1). 1-4.
- <https://sumsel.bps.go.id>





**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro No.1131, Palembang 31029  
Telp. (0711) 351665  
Homepage: <http://sumsel.bps.go.id>, Email: [bps1600@bps.go.id](mailto:bps1600@bps.go.id)

ISSN 3031-3546



9 773031 354008